




PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



 ptunserang

 informasi@ptun-serang.go.id

 www.ptun-serang.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2024



KATA PENGANTAR



Pertama-tama perkenankanlah kami memanjatkan Puji dan Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2024.

Penyusunan Laporan ini didasarkan pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4506/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 Perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024, yang pada intinya berisi Program Kerja dan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam kurun waktu satu tahun.

Dengan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 ini diharapkan mampu merepresentasikan wajah birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menjadi birokrasi bersih dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Dengan kata lain, ini adalah merupakan pekerjaan besar bagi jajaran Peradilan Tata Usaha Negara untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang telah ditetapkan.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2024 ini merupakan laporan atas pelaksanaan kegiatan kinerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selama kurun waktu 2024 yang semata-mata Kami tunjukkan kepada masyarakat pencari keadilan, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang optimal, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai bentuk dari pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sudah ditetapkan yaitu: *“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang Agung”*

Kami menyadari bahwa Laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami menerima dan menghargai kritik dan saran konstruktif guna memperbaiki Laporan Kegiatan di masa yang akan datang.

Serang, 20 Januari 2025

KE T U A,



Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H.
NIP. 19760810 200012 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iv
Daftar Gambar		vi
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Kebijakan Umum Peradilan	1
	B. Visi dan Misi	2
	C. Rencana Strategis	3
BAB II	KEADAAN PERKARA	
	A. Keadaan Perkara Di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	
	1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	6
	2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	6
	3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	6
	4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	6
	B. Penyelesaian Perkara	
	1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	17
	2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	18
	3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding ...	19
	4. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	19
	5. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)	19
	C. Program Prioritas Nasional	
	1. Pos Bantuan Hukum	19
	2. Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	23
BAB III	SUMBER DAYA MANUSIA	
	A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan	27
	B. Mutasi	28
	C. Promosi.....	28
	D. Pensiun.....	29
	E. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat	30
BAB IV	PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
	A. Pengelolaan Keuangan	38
	B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	47
	C. Pengelolaan Teknologi Informasi	52

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu.....	59
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	61
C. Inovasi Pelayanan Publik	65
D. Capaian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Dalam Layanan Publik	71
d.1. Pembangunan Zona Integritas (ZI)	71
d.2. Penganugerahan Sebagai Badan Publik Informatif	73
d.3. Terbaik Peringkat terbaik ke-I untuk Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Beban Perkara 51-100	74
d.4. Peringkat terbaik ke-I Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 51-100	76
d.5. Peringkat terbaik ke-III Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Eksekusi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 51-100.....	77
d.6. Juara ke-III Lomba Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2024	78
d.7. Meraih Piala Bergilir Gubernur Banten sebagai badan publik informatif kategori Lembaga Non Struktural (LNS)/Vertikal	79
d.8. memperoleh predikat sebagai PPID Terbaik dari Komisi Informasi Provinsi Banten kategori Lembaga Non Struktural (LNS)/Vertikal	80
d.9. Satuan Kerja yang berhasil menerapkan program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	81
E. Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik Bagi Penyandang Disabilitas	92
F. Penguatan Jasmani dan Rohani	102

BAB VI PENGAWASAN

A. Internal	104
B. Evaluasi	105

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	107
B. Rekomendasi	108

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama	7
Tabel 2.2. Keadaan Perkara Tingkat Banding	14
Tabel 2.3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	15
Tabel 2.4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	16
Tabel 2.5. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2024	17
Tabel 2.6. Penyelesaian Perkara Tahun 2024	18
Tabel 2.7. Jumlah Layanan Posbakum Tahun 2024	20
Tabel 2.8. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Posbakum 2024	21
Tabel 2.9. Matrik Usulan Revisi RO Pembebasan Biaya Perkara Prodeo 2024	24
Tabel 2.10 Tabel Realisasi Penyelesaian Perkara Melalui Pembebaan Biaya Perkara ...	24
Tabel 2.11 Tabel Realisasi Pelaksanaan Prodeo 2024	25
Tabel 3.1. Komposisi SDM Pengadilan TUN Serang	27
Tabel 3.2. Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai PTUN Serang	28
Tabel 3.3. Rekapitulasi Promosi Hakim dan Pegawai PTUN Serang	28
Tabel 3.4. Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai PTUN Serang	29
Tabel 3.5. Monitoring Diklat/Bimtek Hakim dan Pegawai PTUN Serang	31
Tabel 4.1. Kinerja Realisasi Anggaran dalam <i>Year on Year</i>	39
Tabel 4.2. Realisasi Belanja Pegawai	40
Tabel 4.3. Realisasi Belanja Barang Operasional	41
Tabel 4.4. Realisasi Belanja Modal	42
Tabel 4.5. Realisasi Belanja Barang Operasional Kepaniteraan	43
Tabel 4.6 Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara	43
Tabel 4.7 Realisasi Biaya Eksekusi	44
Tabel 4.8. Matrik Target IKPA pada Renstra 2020-2024 PTUN Serang	46
Tabel 4.9. Nilai IKPA DIPA 01	46
Tabel 4.10. Nilai IKPA DIPA 05	47
Tabel 4.11. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah dan Gedung	47
Tabel 4.12. Keadaan Sarana dan Prasarana Rumah Negara	48
Tabel 4.13. Keadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Roda 2	48
Tabel 4.14. Keadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Roda 4	48
Tabel 4.15. Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49
Tabel 4.16. Penambahan/Hibah Sarana dan Prasarana Gedung.....	50
Tabel 4.17. Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung	50
Tabel 4.18. Keadaan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	51
Tabel 4.19. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	52
Tabel 4.20. Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung	52

Tabel 4.21. Keadaan Perangkat Teknologi Informasi	53
Tabel 4.22. Jumlah Perkara Terdaftar Melalui E-Court	56
Tabel 4.23. Alamat SIPP Web Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	57
Tabel 5.1. Jumlah Permohonan Layanan PTSP Tahun 2024	62
Tabel 6.1. Daftar Nama Hakim Pengawas Bidang Tahun 2024	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Grafik Penyerapan Anggaran posbakum T.A. 2024.....	21
Gambar 2.2. Gafik Penyerapan Anggaran Prodeo T.A. 2024.....	25
Gambar 4.1. Grafik Realisasi Belanja Pegawai	40
Gambar 4.2. Grafik Realisasi Belanja Barang	41
Gambar 4.3. Grafik Realisasi Belanja Modal	42
Gambar 4.4. Ruang Server Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	54
Gambar 4.5. Server Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	54
Gambar 4.6. Lembar Ceklist Monitoring TIK	55
Gambar 4.7. Meja E-Court	55
Gambar 4.8. Mesin Informasi E-Court	56
Gambar 4.9. Tampak Muka Aplikasi SIPP PTUN Serang	57
Gambar 4.10. Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP PTUN Serang	58
Gambar 5.1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu “A” Excellent	60
Gambar 5.2. Meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	61
Gambar 5.3 Mesin Nomor Antrian Pengunjung	62
Gambar 5.4. Tampak Muka Aplikasi PTSP Online	63
Gambar 5.5. Layanan Voice Call PTSP Online	64
Gambar 5.6. Layanan Video Call PTSP Online	64
Gambar 5.7. Layanan Online Chat PTSP Online	64
Gambar 5.8. Tampilan Aplikasi One TUN	65
Gambar 5.9. Aplikasi Aplikasi Asisten Digital JaWara.....	66
Gambar 5.10. Aplikasi inovasi Akses Layanan Touchless	67
Gambar 5.11. Tampak Muka Aplikasi (SIMKARA)	67
Gambar 5.12. Tampak Muka Aplikasi (SIMISTI)	68
Gambar 5.13. Modul User Aplikasi (SIDAPAT)	68
Gambar 5.14. Menu Login Aplikasi (SIMARJAN)	69
Gambar 5.15. Tampak Aplikasi PTSP Online (SEMPURNA)	69
Gambar 5.16. Tampak Muka Aplikasi Tata Persuratan PTUN Serang	70
Gambar 5.17. Maklumat Pelayanan Pada Aplikasi PPID PTUN Serang.....	70
Gambar 5.18. Tampilan Sistem Elektronik Pemeriksaan Setempat e-PS.....	71
Gambar 5.19. Monev Zona Integritas WBBM PTUN Serang	72
Gambar 5.20. Sertifikat Penganugerahan Sebagai Badan Publik Informatif	74

Gambar 5.21. Piagam Penghargaan Peringkat I Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori PTUN Beban Perkara 51-100	75
Gambar 5.22. Piagam Penghargaan Terbaik ke I Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 51-100	76
Gambar 5.23. Piagam Penghargaan Peringkat terbaik ke-III Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Eksekusi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 51-100	77
Gambar 5.24. Piagam Penghargaan Juara ke-III Kegiatan Lomba Peningkatan Pelayanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	78
Gambar 5.25. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima Piala Bergilir Gubernur Banten sebagai badan publik informatif kategori Lembaga Non Struktural (LNS)/Vertikal	79
Gambar 5.26. Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dinobatkan sebagai Petugas PPID Terbaik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten	80
Gambar 5.27. Sertifikat Penghargaan Sebagai Petugas PPID Terbaik Kategori Lembaga Non Struktural (LNS)/Vertikal	80
Gambar: 5.28. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) Tahap Evaluasi Tahun 2024	91
Gambar 5.29 Toilet Khusus Penyandang Disabilitas	93
Gambar 5.30. Tactile Stainless Pamandu bagi Penyandang Disabilitas	93
Gambar 5.31. Ubin Pemandu (<i>guiding block</i>) dan handraill ramp Penyandang Disabilitas	94
Gambar 5.32. Tanda Parkir Bagi Penyandang Disabilitas	94
Gambar 5.33. Tombol Panik (<i>panic button</i>) Pada Toilet Penyandang Disabilitas	95
Gambar 5.34. Tempat Penyimpan Peralatan Disabilitas (<i>Disability Toolkit</i>).....	95
Gambar 5.35. Kursi/Ruang Tunggu Penyandang Disabilitas	96
Gambar 5.36. Rambu/Tanda Prioritas bagi Penyandang Disabilitas	96
Gambar 5.37. Ruang Kesehatan dan Ruang Laktasi	97
Gambar 5.38. Lapangan Permanen dan Musholla sebagai sarana pendukung Tusi Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	97
Gambar 5.39. Ruang Media Center sebagai Saran untuk Rapat Internal maupun dengan eksternal	98

Gambar 5.40. Lemari/box bawah tangga untuk tempat penyimpanan peralatan kebersihan/Janitor	98
Gambar 5.41. Kanopi pada Teras/Lobby Belakang kantor PTUN Serang	99
Gambar 5.42. Ruang Tunggu <i>outdoor</i>	99
Gambar 5.43. Rumah Genset dan Genset	100
Gambar 5.44. Area Parkir Kendaraan Roda Empat Pimpinan dan Hakim	100
Gambar 5.45. Area Parkir Kendaraan Roda Dua Pegawai	101
Gambar 5.46. Area Parkir Kendaraan Pengunjung/Tamu	101
Gambar 5.47 Kegiatan HUT Peratur ke-33 Dikemas Dalam Employee Gathering	102
Gambar 5.48 Kegiatan Menjaga Kebugaran Tubuh Aparatur Melalui Senam dan Maupun Jalan Santai	102
Gambar 5.49 Kegiatan Penguatan Mental dan Spritual Melalui Sholat Berjamaah dan <i>One Day One Juz</i>	103
Gambar 5.50 Kegiatan Meningkatkan Pengetahuan Agama Melalui Kajian Rutin Seputar Ilmu Tajwid, Makharijul Huruf dan Pengetahuan Dasar Lainnya ..	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kebijakan Umum Peradilan

Laporan adalah sebuah produk informasi yang sangat penting karena berkaitan dengan kondisi badan publik, keandalan dari informasi yang terkandung sangatlah dibutuhkan bagi pihak yang mempunyai kepentingan terhadap badan publik. Oleh karenanya badan publik diharapkan lebih transparan dalam mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan oleh Stakeholder karena pengungkapan sebagai salah satu aspek *good governance* diharapkan dapat menjadi dasar untuk melihat baik tidaknya kinerja satu badan publik.

Pengungkapan informasi secara terbuka mengenai satuan kerja sangatlah penting bagi badan publik. Hal ini dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen badan publik kepada stakeholder. Keterbukaan informasi dari satu badan publik dapat digunakan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen badan publik kepada stakeholder. Keterbukaan informasi dari badan publik dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi stakeholder dalam pengambilan kebijakan.

Secara umum kebijakan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Tingkat Pertama, kegiatan yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Lembaga Mahkamah Agung RI sebagai salah satu institusi negara/kepemerintahan sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan yang ada dan

dipercayakan kepada publik serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) Untuk itulah Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024.

B. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Sebagaimana halnya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan lembaga peradilan tertinggi dan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam struktur organisasi berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki Visi dan Misi yang sama dengan organisasi induknya, yaitu:

“TERWUJUDNYA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG YANG AGUNG”

Misi : Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk memperjelas upaya pencapaian keberhasilan visi tersebut, telah dirumuskan 4 misi sebagai fokus program kerjanya:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

C. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2020-2024 ini diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

Perencanaan strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengacu pada Rencana Strategis 2020 – 2024 Mahkamah Agung RI, dan setiap tahun telah dilakukan Reviu oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan (Ketua / Hakim / Panitera dan Sekretaris beserta jajarannya). Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menyusun rencana strategis. Dalam melaksanakan Rencana Strategis tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah membuat langkah-langkah strategis.

Dalam mendukung kebijakan nasional untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menetapkan 6 (enam) arah kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan RPJMN 2020 – 2024 Mahkamah Agung RI berdasarkan isu-isu strategis yang tertuang dalam kerangka regulasi Mahkamah Agung RI yang akan diterapkan pada lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai berikut:

1. Peningkatan Penyelesaian Perkara;
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian Perkara;
3. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim;
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan;
5. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan;
6. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;

Tujuan sasaran strategis tersebut merupakan arah dari Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis yang telah ditentukan perlu ditetapkan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen

Program dukungan manajemen Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas.

Kebijakan dan strategi yang dibuat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk mencapai strategi program dukungan manajemen adalah:

- 1) Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian Perkara Tata Usaha Negara dilakukan melalui peradilan elektronik;
- 2) Peningkatan kapasitas aparatur sipil Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melalui diklat/diklat online;
- 3) Pengadaan sarana dan prasarana internal di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan indikator untuk menguurnya adalah berupa indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
- 4) Penerapan sistem manajemen Perkara berbasis teknologi informasi dan penyesuaian renovasi gedung kantor;
- 5) Peningkatan kapasitas petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam memberikan pelayanan dengan menerapkan budaya kerja "3S" (Senyum, Sapa, Salam) dan lebih profesional.
- 6) Peningkatan rasa tanggung jawab aparatur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan membagi tema dan jadwal sebagai pengisi kegiatan Morning Spirit sebagai wadah dalam memupuk rasa percaya diri seluruh aparatur untuk tampil di muka umum.

b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum dibuat untuk mencapai sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Penyelesaian Perkara
Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- 2) Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase salinan putusan yang dikirimkan ke para pihak tepat waktu.
- 3) Peningkatan Aksesibilitas Putusan Hakim
Sasaran ini dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Peningkatan
- 4) Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan
Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.

5) Peningkatan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase putusan Perkara Tata Usaha Negara yang telah BHT dan ditindaklanjuti (eksekusi)

6) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sasaran ini diukur dengan menggunakan indikator persentase aparatur yang ditugaskan untuk mengikuti diklat.

Rencana strategis tersebut merupakan pemetaan masalah, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid) dapat memperkuat pelaksanaan Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2023 terdapat Sisa 12 (dua belas) perkara, tahun 2024 menerima Perkara masuk 55 (lima puluh lima) Perkara, sehingga Perkara yang harus diselesaikan tahun 2024 adalah 67 (enam puluh tujuh), selama tahun 2024 telah diputus 55 (limapuluh lima) Perkara yang terinci putus karena dicabut 18 (delapan belas) Perkara, dismissal 7 (tujuh) Perkara, perlawanan 1 (satu) perkara, sedangkan 29 (dua puluh Sembilan) perkara diputus biasa, sehingga sisa perkara tahun 2024 sebanyak 12 (dua belas) perkara

2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2023 terdapat sisa perkara banding 6 (enam) Perkara, pada tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima perkara banding 16 (enam belas) perkara, perkara banding yang dicabut 0 (Nol) perkara, perkara banding yang diputus 16 (enam belas) perkara dan sisa perkara banding tahun 2024 ada 6 (enam) Perkara.

3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2023 terdapat sisa perkara kasasi 22 (dua puluh dua) perkara, pada tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima perkara kasasi masuk 13 (tiga belas) perkara, putus kasasi 16 (enam belas), sisa perkara kasasi tahun 2024 sisa kasasi 19 (Sembilan belas) perkara.

4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2023 terdapat sisa perkara Peninjauan kembali sebanyak 4 (empat) perkara, pada tahun 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima perkara peninjauan kembali 6 (enam) perkara, putus 4 (empat) perkara, sehingga sisa perkara peninjauan kembali tahun 2024 ada 6 (enam) perkara.

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

NO	NOMOR PERKARA	JENIS PERKARA	TANGGAL PENERIMAAN	TANGGAL PENETAPAN DISMISSAL	ACARA SINGKAT				ACARA BIASA / ACARA CEPAT				SISA AKHIR NOMOR PERKARA		KETERANGAN
					TANGGAL		TANGGAL		TANGGAL PENETAPAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA / PP	TANGGAL			BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	
					PERNERIMAAN PERLAWANAN	PENETAPAN MAJELIS HAKIM DAN PANITERA / PP	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN PERLAWANAN		PEMERIKSAAN PERSIAPAN	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	35/G/2023/PTUN.SRG	Pertanahan	11/08/2023	-	-	-	-	-	11/08/2023	21/08/2023	26/09/2023	3/1/2024	-	-	Tidak Dapat Diterima
2	41/G/2023/PTUN.SRG	Pertanahan	26/09/2023	-	-	-	-	-	26/09/2023	04/10/2023	24/10/2023	6/2/2024	-	-	Tidak Dapat Diterima
3	42/G/2023/PTUN.SRG	Lain-Lain	19/10/2023	-	-	-	-	-	19/10/2023	26/10/2023	23/11/2023	3/1/2024	-	-	Tidak Dapat Diterima
4	43/G/2023/PTUN.SRG	Pertanahan	20/10/2023	-	-	-	-	-	20/10/2023	31/10/2023	28/11/2023	5/3/2024	-	-	Tidak Dapat Diterima
5	44/G/TF/2023/PTUN.SRG	Tindakan Administrasi Pemerintah/Tindakan Faktual	3/11/2023	-	-	-	-	-	16/11/2023	23/11/2023	14/12/2023	15/2/2024	-	-	Tidak Dapat Diterima
6	45/G/2023/PTUN.SRG	Lain-Lain	6/11/2023	-	-	-	-	-	6/11/2023	14/11/2023	21/12/2023	28/3/2024	-	-	Ditolak
7	46/G/2023/PTUN.SRG	Lain-Lain	6/11/2023	-	-	-	-	-	6/11/2023	14/11/2023	6/12/2023	20/3/2024	-	-	Dikabulkan
8	47/G/2023/PTUN.SRG	Pertanahan	16/11/2023	-	-	-	-	-	16/11/2023	23/11/2023	3/1/2024	13/3/2024	-	-	Dikabulkan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2024

9	48/G/2023/PTUN.SRG	Pertanahan	17/11/2023	-	-	-	-	-	17/11/2023	23/11/2023	19/12/2023	5/3/2024	-	-	Tidak Dapat Diterima
10	49/G/2023/PTUN.SRG	Pertanahan	20/11/2023	-	-	-	-	-	20/11/2023	28/11/2023	20/12/2023	7/3/2024	-	-	Dikabulkan
11	50/G/TF/2023/PTUN.SRG	Tindakan Administrasi Pemerintah/ Tindakan Faktual	4/12/2023	-	-	-	-	-	4/12/2023	12/12/2023	3/1/2024	3/4/2024	-	-	Dikabulkan
12	55/G/2023/PTUN.SRG	Pertanahan	6/12/2023	-	-	-	-	-	6/12/2023	13/12/2023	10/1/2024	30/4/2024	-	-	Ditolak
13	1/G/2024/PTUN.SRG	Pertanahan	03/01/2024	-	-	-	-	-	03/01/2024	10/01/2024	13/02/2024	13/02/2024	-	-	Dicabut
14	2/G/2024/PTUN.SRG	Pergantian Antar Waktu (PAW)	03/01/2024	-	-	-	-	-	25/03/2024	18/01/2024	06/02/2024	25/04/2024	-	-	Ditolak
15	3/G/2024/PTUN.SRG	Pergantian Antar Waktu (PAW)	03/01/2024	-	-	-	-	-	10/01/2024	18/01/2024	06/02/2024	09/02/2024	-	-	Ditolak
16	4/G/2024/PTUN.SRG	Pergantian Antar Waktu (PAW)	3/1/2024	-	-	-	-	-	10/01/2024	18/01/2024	06/02/2024	25/04/2024	-	-	Ditolak
17	5/G/2024/PTUN.SRG	Pergantian Antar Waktu (PAW)	3/1/2024	-	-	-	-	-	10/01/2024	18/01/2024	06/02/2024	25/04/2024	-	-	Ditolak

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2024

18	6/G/2024/PTUN.S RG	Pergantian Antar Waktu (PAW)	3/1/2024	-	-	-	-	-	10/01/2024	18/01/2024	06/02/2024	25/04/2024	-	-	Ditolak
19	7/G/KI/2024/PTU N.SRG	Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	12/1/2024	-	-	-	-	-	28/02/2024	-	07/03/2024	27/03/2024	-	-	Dikabulkan
20	8/G/KI/2024/PTU N.SRG	Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	15/1/2024	-	-	-	-	-	29/02/2024	-	07/03/2024	03/04/2024	-	-	Ditolak
21	9/G/2024/PTUN.S RG	Pertanahan	23/1/2024	-	-	-	-	-	23/1/2024	31/1/2024	27/2/2024	5/06/2024	-	-	Dikabulkan
22	10/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	26/1/2024	-	-	-	-	-	26/1/2024	5/2/2024	06/03/2024	12/06/2024	-	-	Dikabulkan
23	11/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	31/1/2024	-	-	-	-	-	31/1/2024	15/2/2024	28/03/2024	27/06/2024	-	-	Tidak Dapat Diterima
24	12/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	5/2/2024	-	-	-	-	-	5/2/2024	12/2/2024	13/03/2024	19/06/2024	-	-	Tidak Dapat Diterima
25	13/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	27/3/2024	-	-	-	-	-	27/3/2024	4/4/2024	13/05/2024	27/05/2024	-	-	Dicabut
26	14/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	7/05/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	21/05/2024	-	-	Dicabut
27	15/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	13/05/2024	-	-	-	-	-	20/5/2024	28/5/2024	19/06/2024	8/10/2024	-	-	Dikabulkan

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2024

28	16/G/2024/PTUN.SRG	Pertanahan	17/5/2024	-	-	-	-	-	17/5/2024	28/5/2024	2/07/2024	8/10/2024	-	-	Dicabut
29	17/G/2024/PTUN.SRG	Lain-lain	20/5/2024	3/6/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Lolos Dismissal
30	18/G/2024/PTUN.SRG	Pertanahan	22/5/2024	-	-	-	-	-	22/5/2024	29/5/2024	26/6/2024	11/09/2024	-	-	Tidak Dapat Diterima
31	19/G/2024/PTUN.SRG	Pertanahan	4/6/2024	-	-	-	-	-	4/6/2024	12/6/2024	4/07/2024	12/09/2024	-	-	Tidak Dapat Diterima
32	20/G/2024/PTUN.SRG	Lain-lain	5/6/2024	-	-	-	-	-	19/06/2024	12/6/2024	20/06/2024	20/06/2024	-	-	Dicabut
33	21/G/2024/PTUN.SRG	Pertanahan	19/6/2024	-	-	-	-	-	19/6/2024	26/6/2024	17/07/2024	16/10/2024	-	-	Tidak Dapat Diterima
34	22/G/2024/PTUN.SRG	Pertanahan	20/6/2024	-	-	-	-	-	20/6/2024	2/07/2024	30/07/2024	10/10/2024	-	-	Tidak Dapat Diterima
35	23/G/TF/2024/PTUN.SRG	Tindakan Administrasi Pemerintah/ Tindakan Faktual	21/6/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	24/7/2024	-	-	Dicabut
36	24/G/2024/PTUN.SRG	Kepegawaian	26/7/2024	-	-	-	-	-	26/7/2024	5/8/2024	22/8/2024	7/11/2024	-	-	Ditolak
37	25/G/2024/PTUN.SRG	Lain-Lain	29/7/2024	-	-	-	-	-	29/7/2024	7/8/2024	12/9/2024	12/9/2024	-	-	Dicabut

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2024

38	26/G/2024/PTUN.SRG	Pertanahan	7/8/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	15/08/2024	-	-	Dicabut
39	27/G/2024/PTUN.SRG	Lain-Lain	8/8/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	22/8/2024	-	-	Dicabut
40	28/G/2024/PTUN.SRG	Pertanahan	14/8/2024	28/8/2024	-	-	-	-	-	-	-	28/8/2024	-	-	Tidak Dapat Diterima
41	29/G/TF/2024/PTUN.SRG	Tindakan Administrasi Pemerintah/ Tindakan Faktual	23/8/2024	-	-	-	-	-	23/8/2024	4/9/2024	19/9/2024	19/9/2024	-	-	Dicabut
42	30/G/2024/PTUN.SRG	Pertanahan	27/8/2024	-	-	-	-	-	17/9/2024	25/9/2024	29/9/2024	-	-	V	Belum Diputus
43	31/G/2024/PTUN.SRG	Pertanahan	28/8/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	4/9/2024	-	-	Dicabut
44	32/G/TF/2024/PTUN.SRG	Tindakan Administrasi Pemerintah/ Tindakan Faktual	8/30/2024	-	-	-	-	-	8/30/2024	9/10/2024	15/10/2024	21/11/2024	-	-	Dikabulkan
45	33/G/2024/PTUN.SRG	Lain-Lain	3/9/2024	-	-	-	-	-	3/9/2023	11/9/2024	15/10/2024	17/12/2024	-	-	Ditolak
46	34/G/2024/PTUN.SRG	Pertanahan	5/9/2024	-	-	-	-	-	5/9/2023	12/9/2024	3/10/2024	-	-	V	Belum Diputus

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2024

47	35/G/KI/2024/PTUN. N.SRG	Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	5/9/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	24/09/2024	-	-	Dicabut
48	36/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	6/9/2024	-	-	-	-	-	6/9/2023	12/9/2024	3/10/2024	-	-	V	Belum Diputus
49	37/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	12/9/2024	19/9/2024	30/9/2024	8/10/2024	16/10/2024	-	-	-	-	30/10/2024	-	-	Dicabut
50	38/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	23/9/2024	-	-	-	-	-	23/9/2024	1/10/2024	6/11/2024	-	-	V	Belum Diputus
51	39/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	23/9/2024	11/10/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Dapat Diterima
52	40/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	1/10/2024	-	-	-	-	-	1/10/2024	16/10/2024	6/11/2024	-	-	V	Belum Diputus
53	41/G/2024/PTUN. SRG	Lain-Lain	7/10/2024	-	-	-	-	-	7/10/2024	15/10/2024	19/11/2024	19/11/2024	-	-	Dicabut
54	42/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	8/10/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	15/10/2024	-	-	Dicabut
55	43/G/2024/PTUN. SRG	Lain-Lain	9/10/2024	-	-	-	-	-	9/10/2024	10/10/2024	31/10/2024	-	-	V	Belum Diputus
56	44/G/2024/PTUN. SRG	Kepegawaian	4/11/2024	-	-	-	-	-	12/11/2024	21/11/2024	19/12/2024	-	-	V	Belum Diputus
57	45/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	11/7/2024	11/18/2024	-	-	-	-	-	-	-	11/18/2024	-	-	Tidak Dapat Diterima

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2024

58	46/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	8/11/2024	-	-	-	-	-	8/11/2024	18/11/2024	18/12/2024	-	-	V	Belum Diputus
59	47/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	14/11/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	21/11/2024	-	-	Dicabut
60	48/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	22/11/2024	2/12/2024	12/12/2024	12/12/2024	19/12/2024	-	-	-	-	-	-	V	Belum Diputus
61	49/G/2024/PTUN. SRG	Lain-Lain	28/11/2024	-	-	-	-	-	28/11/2024	5/12/2024	23/12/2024	-	-	V	Belum Diputus
62	50/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	28/11/2024	5/12/2024	-	-	-	-	-	-	-	5/12/2024	-	-	Tidak Dapat Diterima
63	51/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	6/12/2024	-	-	-	-	-	6/12/2024	12/12/2024	-	17/12/2024	-	-	Dicabut
64	52/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	6/12/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	16/12/2024	-	-	Dicabut
65	53/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	11/12/2024	-	-	-	-	-	11/12/2024	17/12/2024	14/01/2025	-	-	V	Belum Diputus
66	54/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	17/12/2024	-	-	-	-	-	17/12/2024	24/12/2024	-	-	-	V	Belum Diputus
67	55/G/2024/PTUN. SRG	Pertanahan	30/12/2024	-	-	-	-	-	30/12/2024	1/7/2025	-	-	-	V	Belum Diputus

Tabel 2.2. Keadaan Perkara Tingkat Banding

NO.	NOMOR PERKARA	TANGGAL			NO. PERKARA BANDING	KETERANGAN
		PUTUSAN PTUN	PERMOHONAN BANDING	PENGIRIMAN BERKAS		
1	2	4	5	6	7	8
1	37/G/2023/PTUN.SRG	06/12/2023	13/12/2023	11/1/2024	28/B/2024/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 26-10-2024
2	35/G/2023/PTUN.SRG	3/1/2024	15/1/2024	13/2/2024	159/B/2024/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 26-10-2024
3	41/G/2023/PTUN.SRG	02/06/2024	13/2/2024	5/3/2024	189/B/2024/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 18-10-2024
4	44/G/TF/2023/PTUN.SRG	15/2/2024	27/4/2024	18/3/2024	194/B/TF/2024/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 24-04-2024
5	49/G/2023/PTUN.SRG	7/3/2024	14/3/2024	04/02/2024	216/B/2024/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 04-06-2024
6	47/G/2023/PTUN.SRG	13/3/2024	15/3/2024	16/4/2024	232/B/2024/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 28-05-2024
7	48/G/2023/PTUN.SRG	03/05/2024	18/3/2024	16/4/2024	233/B/2024/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 28-05-2024
8	45/G/2023/PTUN.SRG	28/3/2024	5/4/2024	30/4/2024	246/B/2024/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 10-06-2024
9	50/G/TF/2023/PTUN.SRG	3/4/2024	16/4/2024	27/5/2024	281/B/2024/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 12-06-2024
10	2/G/2024/PTUN.SRG	25/4/2024	7/5/2024	27/5/2024	282/B/2024/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 07-08-2024
11	3/G/2024/PTUN.SRG	25/4/2024	7/5/2024	16/7/2024	358/B/2024/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 03-07-2024
12	10/G/2024/PTUN.SRG	12/6/2024	24/6/2024	23/10/2024	448/B/2024/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 24-04-2024
13	18/G/2024/PTUN.SRG	11/9/2024	25/9/2024	23/10/2024	449/B/2024/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 09-12-2024

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2024

14	19/G/2024/PTUN.SRG	12/9/2024	26/9/2024	13/11/2024	475/B/2024/PT.TUN.JKT	Pemberitahuan Putusan Banding tgl 09-12-2024
15	15/G/2024/PTUN.SRG	8/10/2024	21/10/2024	26/11/2024	475/B/2024/PT.TUN.JKT	-
16	21/G/2024/PTUN.SRG	8/10/2024	30/10/2024	24/11/24	486/B/2024/PT.TUN.JKT	-

Tabel 2.3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

NO.	NOMOR PERKARA P.TUN	TANGGAL					NO. PERKARA KASASI	KETERANGAN
		PENERIMAAN BERKAS PT TUN OLEH PTUN	PUTUSAN PT TUN	PEMBERITAHUAN PUTUSAN PT TUN	PERMOHONAN KASASI	PENGIRIMAN BERKAS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22/G/2023/PTUN.SRG	21/12/2023	20/12/2024	21/12/2023	01/04/2023	7/2/2024	210K/TUN/2024-	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 10-07-2024
2	33/G/2023/PTUN.SRG	22/1/2024	18/1/2024	22/1/2024	1/2/2024	19/3/2024	342K/TUN/2024--	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 04-11-2024
3	13/G/2023/PTUN.SRG	22/1/2024	19/1/2024	22/1/2024	2/2/2024	18/4/2024	337K/TUN/2024-	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 05-9-2024
4	37/G/2023/PTUN.SRG	20/2/2024	20/2/2024	20/2/2024	29/2/2024	30/4/2024	307K/TUN/2024-	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 13-8-2024
5	35/G/2023/PTUN.SRG	28/3/2024	26/3/2024	28/3/2024	4/4/2024	-	210K/TUN/2024-	Cabut
6	44/G/TF/2023/PTUN.SRG	24/4/2024	23/4/2024	24/4/2024	6/5/2024	14/6/2024	479 K/TUN/TF/2024	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 05-11-2024
7	47/G/2023/PTUN.SRG	28/5/2024	27/5/2024	28/5/2024	29/5/2024	1/8/2024	599 K/TUN/TF/2024	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 20-11-2024
8	50/G/TF/2023/PTUN.SRG	12/6/2024	12/6/2024	12/6/2024	24/6/2024	26/8/2024	615 K/TUN/TF/2024	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 20-12-2024

9	3/G/2024/PTUN.SRG	3/7/2024	3/7/2024	3/7/2024	16/7/2024	-	688K/TUN/TF/2024	
10	2/G/2024/PTUN.SRG	7/8/2024	6/8/2024	7/8/2024	12/8/2024	-	718 K/TUN/TF/2024	Pemberitahuan Putusan Kasasi tgl 20-11-2024
11	49//G/2023/PTUN.SRG	4/6/2024	3/6/2024	4/6/2024	12/6/2024	15/8/2024	602 K/TUN/2024	
12	10/G/2024/PTUN.SRG	24/9/2024	23/9/2024	24/9/2024	4/10/2024	28/10/2024	-	
13	19/G/2024/PTUN.SRG	9/12/2024	5/12/2024	9/12/2024	20/12/2024	-	-	

Tabel 2.4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

NO	NOMOR PERKARA P.TUN	TANGGAL					NO. PERKARA PK	KETERANGAN
		PENERIMAAN BERKAS MA-RI	PUTUSAN KASASI	PEMBERITAHUAN PUTUSAN KASASI	PERMOHONAN PK	PENGIRIMAN BERKAS PK		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	62/G/2022/PTUN.SRG	9/11/2023	9/11/2023	9/11/2023	5/3/2024	19/4/2024	104PK/TUN/2024	Pemberitahuan Putusan PK 16-12-2024
2	20/G/2023/PTUN.SRG	26/4/2024	4/3/2024	26/4/2024	11/6/2024	14/8/2024	160 PK/TUN/2024	Pemberitahuan Putusan PK 3-12-2024
3	70/G/2022/PTUN.SRG	26/4/2024	4/3/2024	26/4/2024	12/6/2024	15/8/2024	155 PK/TUN/2024	Pemberitahuan Putusan PK 2-12-2024
4	22/G/2023/PTUN.SRG	10/7/2024	12/6/2024	10/7/2024	16/10/2024	17/12/2024	-	-
5	9/G/2024/PTUN.SRG	06/05/2024	5/6/2024	06/05/2024	30/10/2024	24/12/2024	-	-
6	47/G/2023/PTUN.SRG	20/11/2024	28/10/2024	20/11/2024	11/12/2024	-	-	-

B. Penyelesaian Perkara

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2023 masih terdapat sisa 12 (dua belas) perkara, tahun 2024 perkara masuk 55 (lima puluh lima) perkara, sehingga selama tahun 2024 jumlah perkara yang harus diselesaikan 67 (enam puluh tujuh) perkara, dari jumlah tersebut telah diselesaikan sebanyak 55 (lima puluh lima) perkara dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus Tahun 2024

No.	Jenis Perkara	Sisa Perkara
1	2	3
A	GUGATAN	
1	Pertanahan	34
2	Kepegawaian	1
3	Perijinan	
4	Lingkungan Hidup	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-
6	Badan Hukum/Parpol	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	-
8	Kepala Daerah	-
9	Proses Pemilihan Umum	-
10	Penggantian Antar Waktu	5
11	Ketenagakerjaan	-
12	Sengketa Informasi Publik (KIP)	-
13	Pengadaan Tanah	-
14	Fiktif Positif	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	5
17	Merek	-
18	Lain-lain	10
JUMLAH		55

2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2024 terdapat Perkara yang Putus Kurang dari 3 (tiga) Bulan sejumlah 24 (dua puluh empat) Perkara, Perkara yang putus 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) Bulan sejumlah 31 (tiga puluh satu) Perkara, dan Perkara putus 5 (lima) sampai dengan 12 (dua belas) Bulan tidak ada dari jumlah Perkara yang diselesaikan sebanyak 55 (lima puluh lima) Perkara.

Tabel 2.6. Penyelesaian Perkara Tahun 2024

No	PERKARA PUTUS TAHUN 2024		
	KURANG DARI 3 BULAN	3 – 5 BULAN	5 – 12 BULAN
1	2	3	4
1.	28/G/2024/PTUN.SRG		
2.	51/G/2024/PTUN.SRG		
3.		46/G/2023/PTUN.SRG	
4.		47/G/2023/PTUN.SRG	
5.		49/G/2023/PTUN.SRG	
6.		50/G/TF/2023/PTUN.SRG	
7.		9/G/2024/PTUN.SRG	
8.		10/G/2024/PTUN.SRG	
9.		15/G/2024/PTUN.SRG	
10.	32/G/TF/2024/PTUN.SRG		
11.	45/G/2024/PTUN.SRG		
12.	47/G/2024/PTUN.SRG		
13.		45/G/2023/PTUN.SRG	
14.		55/G/2023/PTUN.SRG	
15.		2/G/2024/PTUN.SRG	
16.		3/G/2024/PTUN.SRG	
17.		4/G/2024/PTUN.SRG	
18.		5/G/2024/PTUN.SRG	
19.		6/G/2024/PTUN.SRG	
20.		24/G/2024/PTUN.SRG	
21.		33/G/2024/PTUN.SRG	
22.		35/G/2023/PTUN.SRG	
23.		41/G/2023/PTUN.SRG	
24.		42/G/2023/PTUN.SRG	
25.		43/G/2023/PTUN.SRG	
26.		44/G/TF/2023/PTUN.SRG	
27.		48/G/2023/PTUN.SRG	
28.		11/G/2024/PTUN.SRG	
29.		12/G/2024/PTUN.SRG	
30.	17/G/2024/PTUN.SRG		
31.		18/G/2024/PTUN.SRG	
32.		21/G/2024/PTUN.SRG	
33.	39/G/2024/PTUN.SRG		

34.	50/G/2024/PTUN.SRG		
35.	1/G/2024/PTUN.SRG		
36.	13/G/2024/PTUN.SRG		
37.	14/G/2024/PTUN.SRG		
38.		16/G/2024/PTUN.SRG	
39.	20/G/2024/PTUN.SRG		
40.	23/G/TF/2024/PTUN.SRG		
41.	25/G/2024/PTUN.SRG		
42.	26/G/2024/PTUN.SRG		
43.	27/G/2024/PTUN.SRG		
44.	29/G/TF/2024/PTUN.SRG		
45.	31/G/2024/PTUN.SRG		
46.	37/G/2024/PTUN.SRG		
47.	41/G/2024/PTUN.SRG		
48.	42/G/2024/PTUN.SRG		
49.		19/G/2024/PTUN.SRG	
50.		22/G/2024/PTUN.SRG	
51.	52/G/2024/PTUN.SRG		
52.	07/G/KI/2024		
53.	08/G/KI/2024		
54.		42/G/2023/PTUN.SRG	
55.		35/G/2023/PTUN.SRG	
JML	24 Perkara	31 Perkara	

3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 39 (tiga puluh sembilan) perkara
4. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 3 (tiga) perkara
5. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) 11 (sebelas) perkara

C. Program Prioritas Nasional

1. Pos Bantuan Hukum

Pos Bantuan Hukum adalah Layanan yang dibentuk oleh Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam rangka pemertaaan akan akses dan pelayanan peradilan bagi masyarakat yang kurang mampu (*Justice For All*), maka disusunlah suatu program pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat dengan dibiayai oleh negara.

Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah layanan dalam DIPA sebanyak 480 Jam Layanan dengan Biaya sebesar Rp33.000.000,- (*Tiga puluh tiga juta rupiah*) dengan target volume sebanyak 96 orang yang seluruhnya dibiayai dari anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA-05) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Dalam implementasi pelaksanaan layanan Pos Bantuan Hukum tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerapkan Jam Layanan Konsultan Hukum Posbakum dengan detil [2 Jam x 5 hari x 4 minggu x 12 bulan] untuk lebih meningkatkan layanan akses peradilan bagi masyarakat masyarakat miskin dan terpinggirkan.

Adapun capaian layanan konsultasi hukum pada kegiatan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk tahun 2024 berdasarkan target dalam DIPA dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7 Jumlah Layanan Posbakum Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Pengguna Posbakum yang Terlayani Tahun 2024
1	Januari	12 orang
2	Februari	12 orang
3	Maret	10 orang
4	April	11 orang
5	Mei	12 orang
6	Juni	8 orang
7	Juli	14 orang
8	Agustus	10 orang
9	September	10 orang
10	Oktober	13 orang
11	Nopember	5 orang
12	Desember	5 Orang
Jumlah		120 orang

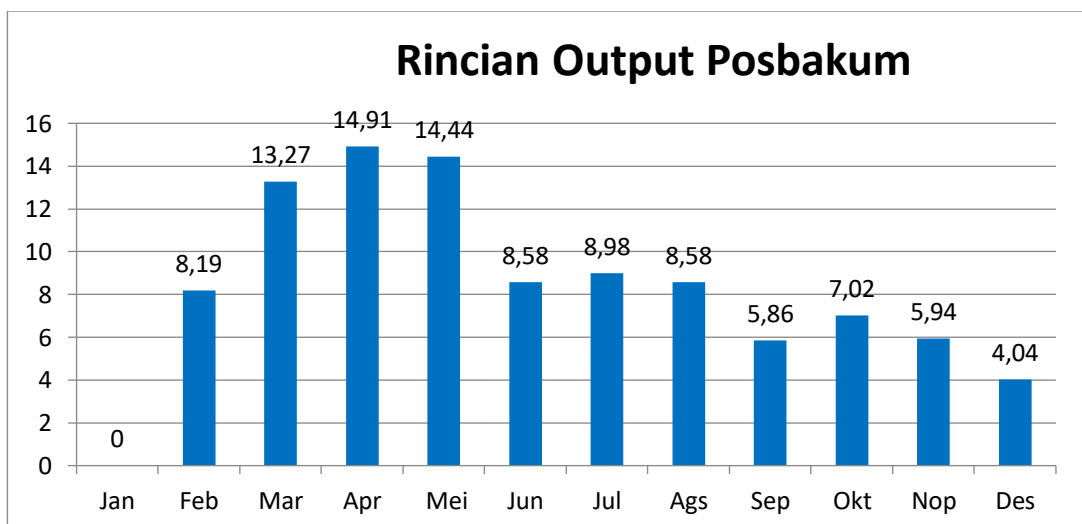
Berdasarkan tabel di atas dapat dinyatakan bahwa jumlah capaian layanan bagi masyarakat yang memanfaatkan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebanyak 120 orang hal ini telah melampaui dari target yang dibebankan pada DIPA tahun anggaran 2024 yakni 96 orang.

Pelaksanaan layanan posbakum merupakan salah satu sasaran strategis yang ke-3 yakni Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan pada indikator persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum, maka dalam hal ini capaian Posbakum Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melampaui target yang dicanangkan pada DIPA, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah melakukan efisiensi sebesar 25,00% atas penggunaan sumber daya dalam mencapai target kinerja.

Adapun realisasi pelaksanaan anggaran kegiatan Pos Bantuan Hukum tahun anggaran 2024 dapat diuraikan pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 2.8 Realisasi Pelaksanaan Anggaran Posbakum 2024

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres Realisasi
Posbakum	33,000,000	32,938,000	99,81%



Gambar: 2.1. Grafik Penyerapan Anggaran Posbakum T.A. 2024

Pada grafik di atas anggaran Pos Bantuan Pelayanan Hukum (Posbakum) pada Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah terserap sebesar 99,81%. Dalam melaksanakan kegiatan layanan hukum berupa informasi, konsultasi dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Capaian kinerja anggaran telah melampaui dari Target Rincian Volume Output (TVRO) sebanyak 96 orang. Untuk itu Stakeholder Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tetap perlu mengadakan evaluasi atas pelaksanaan Posbakum tahun 2024 guna mempertahankan kinerja Posbakum yang dinilai cukup baik pada rencana pelaksanaan Posbakum tahun anggaran berikutnya (2025) dengan evaluasi terhadap beberapa hal antara lain:

- a. Penyedia Layanan Posbakum wajib menyampaikan rencana program kerja yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tahun anggaran berjalan;
- b. Diadakan evaluasi per-triwulan oleh tim pengawasan dan pemeriksaan atas kinerja Penyedia Layanan Posbakum;
- c. Evaluasi kinerja triwulan I Target Volume Rincian Output tidak tercapai maka tim pengawasan dan pemeriksaan kinerja memberikan teguran serta akan memantau progres capaian tiap bulan berikutnya sampai dengan triwulan II. Dalam hal Penyedia sampai dengan triwulan II tidak sanggup mencapai target yang telah dicanangkan pada Kontrak/MoU, maka dilakukan pemutusan kontrak.
- d. Dalam pelaksanaan tugas sebagai konsultan hukum Posbakum yang telah ditunjuk maka diharapkan membantu Satker dalam menjangking perkara yang berpotensi dapat mengajukan penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (Prodeo) dengan tetap menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

2. Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Prodeo adalah Layanan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan menanggung biaya proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga setiap orang yang tidak mampu secara finansial dapat berperkara secara cuma-cuma.

Untuk tahun anggaran 2024 melalui DIPA-05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara, Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara telah melalui sosialisasi di berbagai sarana (cetak *banner*, *pamflet*, dan melalui siaran radio daerah). Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menargetkan sebanyak 2 (dua) perkara yang akan diselesaikan dengan memanfaatkan layanan pembebasan biaya berperkara (prodeo) dengan alokasi anggaran pembebasan biaya panjar perkara prodeo sebesar Rp510.000,- per perkara dengan total anggaran Rp1.020.000,- (*Satu juta dua puluh ribu rupiah*).

Adapun dalam kurun waktu sampai dengan triwulan ke-III tahun 2024 belum ada Pihak berperkara yang berkenan memanfaatkan bantuan layanan pembebasan biaya perkara (Prodeo), maka berdasarkan hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengajukan revisi anggaran DIPA-05 dengan jenis kewenangan revisi pusat untuk mengurangi Target Volume RO pada Kegiatan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).

Pengurangan volume rincian output ini dimaksudkan agar capaian kinerja pelaksanaan anggaran maupun kinerja sasaran strategis Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menjadi lebih baik dan berkualitas.

Tabel 2.9 Matrik Usulan Revisi Pengurangan Target RO Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Tahun 2024

Program/ KRO/RO/ Komponen	Uraian	Pagu Anggaran				
		Semula		Menjadi		+/-
		Target	Jumlah (Rp)	Target	Jumlah (Rp)	Jumlah (Rp)
005.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					
1059	Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara					
1059.AEA	Koordinasi [Base Line]					
1059.AEA.003	Dukungan Penyelesaian Perkara	1,00	16.400.000	1,00	16.400.000	-
1059.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan [Base Line]					
1059.QBA.001	Layanan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	96,00	33.000.000	96,00	33.000.000	-
1059.QCA	Perkara Hukum Perseorangan[Base Line]					
1059.QCA.001	Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	2,00	1.020.000	1,00	510.000	- 510.000
TOTAL			50.420.000		49.910.000	- 510.000

Dari tabel di atas target penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (Prodeo) yang semula 2 Perkara diusulkan revisi menjadi 1 Perkara sehingga anggaran berkurang semula Rp1.020.000,- menjadi Rp510.000,-.

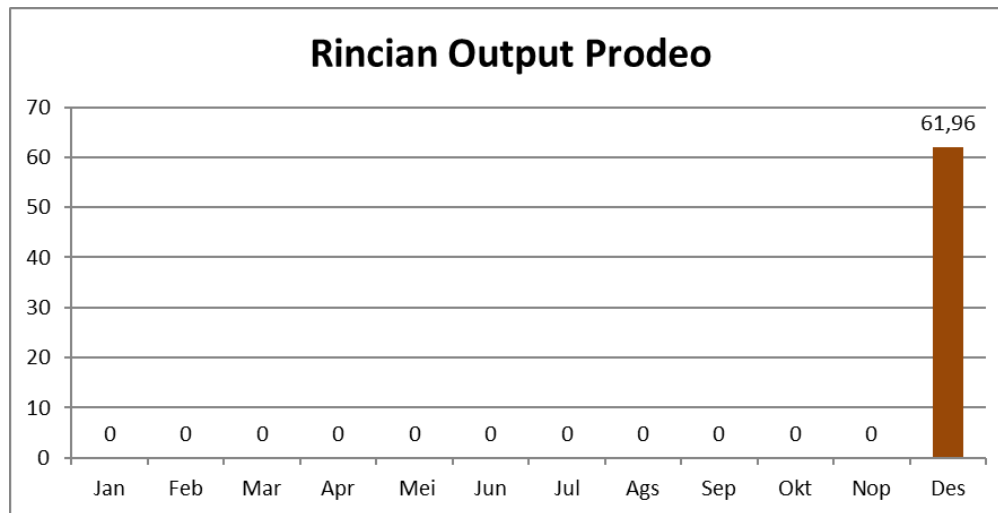
Berdasarkan target yang disepakati menjadi 1 Perkara Prodeo, pada bulan Desember 2024 masuk perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara.

Tabel 2.10 Realisasi Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) Tahun 2024

No	Nomor Perkara	Jenis Perkara	Tanggal Putusan	Biaya Perkara	Ket
1.	52/G/2024/PTUN.SRG	Pertanahan	Senin, 16 Des. 2024	Rp. 316.000	Dicabut

Tabel 2.11 Realisasi Anggaran Pelaksanaan Prodeo 2024

Klasifikasi RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Progres Realisasi
Prodeo	510,000	316,000	61,96%



Gambar: 2.2. Grafik Penyerapan Anggaran Prode T.A. 2024

Berdasarkan grafik tersebut di atas realisasi anggaran penyelesaian perkara melalui pembebasan biaya perkara (Prodeo) adalah sebesar 61,96% hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh anggaran Prodeo terserap pada tahun anggaran 2024.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi sangat penting dan menentukan, karena sumber daya manusia adalah roda penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh institusi tersebut. Untuk itu diperlukan sumber daya manusia yang bisa bekerjasama, berintegritas tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna dan sadar akan tanggung jawab. Oleh karena itu sangatlah penting untuk mengelola sumber daya manusia dengan tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya.

Dengan beban kerja yang ada dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi jumlah, pendidikan dan kompetensi, sumber daya manusia di Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu sumber daya manusia bidang teknis yudisial, sumber daya manusia bidang non teknis yudisial dan tenaga honorer atau pegawai pemerintah non pegawai negeri (PPNPN). sumber daya manusia bidang teknis yudisial menangani administrasi bagian keperkaraan sedangkan sumber daya manusia bidang non teknis yudisial menangani administrasi umum kesekretariatan.

Adapun komposisi sumber daya manusia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan sampai dengan bulan Desember 2024

Tabel 3.1. Komposisi SDM Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

NO	JABATAN	JUMLAH	JENIS KELAMIN		GOL. IV					GOL. III				GOL. II				GOL. I				PENDIDIKAN						
			LK	PR	a	b	c	d	e	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	S.3	S.2	S.1	D.3	SMA	SMP	SD
I	HAKIM																											
	1. Ketua	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Wakil Ketua	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Hakim	18	11	7	12	1	1	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	11	5	-	-	-	
4. Calon Hakim	14	8	6	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-		
II	KEPANITERAAN																											
	1. Panitera	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2. Panitera Muda Perkara	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Panitera Muda Hukum	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3. Panitera Pengganti	7	4	3	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	
	4. Juru Sita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5. Juru Sita Pengganti	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-		
6. Calon Juru Sita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
III	KESEKRETARIATAN																											
	1. Sekretaris	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	3. Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	4. Ka.Sub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	5. Pejabat Fungsional	2	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
6. Staff	4	3	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-		
IV	PEGAWAI PEMERINTAN NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)	14	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	4	-	-	
J U M L A H		70	44	26	13	2	3	-	-	16	3	6	11	-	-	-	2	-	-	-	-	3	16	45	2	4	-	-

B. Mutasi

Rekapitulasi mutasi hakim dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2024:

Tabel 3.2. Rekapitulasi Mutasi Hakim dan Pegawai
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

NO.	JABATAN	MUTASI MASUK	MUTASI KELUAR	KET.
I.	HAKIM			
	1. Ketua	1	1	TMT Juli
	2. Wakil Ketua	1	1	TMT Agustus dan Oktober
	3. Hakim	7	1	TMT Februari, Juli, Agustus, Oktober dan Desember
	4. Calon Hakim	-	1	TMT April
II.	KEPANITERAAN			
	1. Panitera	-	-	
	2. Panitera Muda	-	-	
	3. Panitera Pengganti	1	-	TMT Juli
	4. Juru Sita	-	-	
	5. Juru Sita Pengganti	-	-	
	6. Calon Juru Sita	-	-	
III.	KESEKRETARIATAN			
	1. Sekretaris	-	-	
	2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	-	-	
	3. Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	-	-	
	4. Ka.Sub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	-	-	
	5. Staf	2	-	TMT Mei
	JUMLAH	12	4	

C. Promosi

Rekapitulasi promosi hakim dan pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2024:

Tabel 3.3. Rekapitulasi Promosi Hakim dan Pegawai
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

NO.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
I.	HAKIM		
	1. Ketua	1	Promosi Hakim Tinggi PT.TUN Banjarmasin diperbantukan pada Badan Pengawasan MA RI
	2. Wakil Ketua	1	Promosi Ketua PTUN Bandar Lampung

	3. Hakim	-	-
	4. Calon Hakim	-	-
II.	KEPANITERAAN		
	1. Panitera	-	-
	2. Panitera Muda	-	-
	3. Panitera Pengganti	-	-
	4. Juru Sita	-	-
	5. Juru Sita Pengganti	-	-
	6. Calon Juru Sita	-	-
III.	KESEKRETARIATAN		
	1. Sekretaris	-	-
	2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	-	-
	3. Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	-	-
	4. Ka.Sub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	-	-
	5. Staf	1	Promosi menjadi Juru Sita Pengganti
	JUMLAH	1	

D. Pensiun

Tabel 3.4. Rekapitulasi Pensiun Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

NO.	JABATAN	JUMLAH	TMT PENSIUN	KET.
I.	HAKIM			
	1. Ketua	-	-	-
	2. Wakil Ketua	-	-	-
	3. Hakim	-	-	-
	4. Calon Hakim	-	-	-
II.	KEPANITERAAN			
	1. Panitera	-	-	-
	2. Panitera Muda	-	-	-
	3. Panitera Pengganti	-	-	-
	4. Juru Sita	-	-	-
	5. Juru Sita Pengganti	-	-	-
	6. Calon Juru Sita	-	-	-
III.	KESEKRETARIATAN			
	1. Sekretaris	-	-	-
	2. Ka.Sub.Bag. Kepegawaian dan Ortala	-	-	-
	3. Ka.Sub.Bag. Umum dan Keuangan	-	-	-
	4. Ka.Sub.Bag. Perencanaan TI dan Pelaporan	-	-	-
	5. Staf	-	-	-
	JUMLAH	-		

E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Secara umum pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Kemampuan ASN untuk menyelesaikan tugas-tugas sesuai waktu yang ditetapkan sangat penting sebab jika tidak maka kita akan ketinggalan dengan negara-negara lain yang kualitas sumber daya aparaturnya lebih tinggi, maka perlu melakukan pengembangan kompetensi aparatur agar terdapat keseimbangan antara beban kerja dengan kompetensi aparatur. Karena diyakini, melalui pengembangan kompetensi inilah diharapkan dapat menjawab persoalan yang terus berkembang.

Sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dicanangkan pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2020 – 2024 dalam rangka mendukung kebijakan nasional berdasarkan isu-isu strategis dimana salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program dukungan manajemen yang dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mencapai pengawasan yang berkualitas.

Guna meningkatkan kemampuan sumber daya manusia teknis yudisial dan non teknis yudisial serta dalam rangka melakukan pembinaan, pengelolaan terhadap sumber daya manusia, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengikutsertakan pejabat fungsional, pejabat struktural dan staf potensial untuk mengikuti pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Koordinator Wilayah (Korwil).

Daftar Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis Yudisial Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang telah mengikuti pendidikan/pelatihan pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.5. Monitoring Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Periode Tahun 2024

No.	Mata Diklat/Bimtek	Peserta Diklat/Bimtek	Jabatan	Tgl Mulai Diklat/Bimtek	Tgl. Akhir Diklat/Bimtek
1.	Bimbingan Teknis Pembuatan Bukti Potong PPh 1721 A-2 dan Tarif Efektif PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang Barat	1. JIMMY F. D. SIANTURI, S.H., M.H.	1. Juru Sita Pengganti/Bendahara	24 Januari 2024	24 Januari 2024
2.	Bimbingan Teknis Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	1. FATMAWATY, S.H., M.H..	Hakim	5 Februari 2024	7 Februari 2024
3.	Training of Tutor dan Training of Mentor Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Tata Usaha Negara Angkatan IV Seluruh Indonesia	1. KUSMAN, S.IP., S.H., M.Hum. 2. EKA PUTRANTI, S.H., M.H 3. Dr. UMAR DANI, S.H., M.H. 4. M. NOOR HALIM P. KUSUMA, S.H., M.H. 5. TIAR MAHARDI, S.H., M.H. 6. AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.	Hakim	15 Februari 2024	19 Februari 2024
4.	Pelatihan Pemaknaan KEPPH yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial RI	EKA PUTRANTI, S.H., M.H. Dr. UMAR DANI, S.H., M.H.	Hakim	29 Februari 2024	3 Maret 2024

<p>5. Diklat I Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Tata Usaha Negara Angkatan IV Gelombang 2</p>	<p>FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS, S.H. ANGGIAN PETER DOLLY SITUMEANG, S.H. INDRA JAYA NATA, S.H. OVI HANIFAH, S.H. SHENNY RUSTAM MOIDADY, S.H. RIZKI MUBAROK, S.H SELEXTA APRILIANI, S.H. NI NENGAH DHEA RISKI PUTRI NANDITA, S.H PUTU CARINA SARI DEVI, S.H. SHAFIRA AMALIA ZAHARA, S.H. MUHAMAD FADILLAH, S.H. ANDI DENI HERWIN, S.H. IRFAN AMOS SAMPE, S.H RIZKY PRATAMA, S.H.</p>	<p>Klerek - Analisis Perkara Peradilan/ Calon Hakim</p>	<p>25 Maret 2024</p>	<p>23 Mei 2024</p>
<p>6. Pelatihan Singkat Sengketa Administrasi Secara Elektronik dan Persidangan Elektronik (E-Litigation) bagi Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia</p>	<p>ANDRY ASANI, S.H., M.H. EKA PUTRANTI, S.H., M.H. ALI ANWAR, S.H., M.H. TAMADO DHARMAWAN, S.H., M.H. HARISTOV ASZADHA, S.H. FATMAWATY, S.H., M.H.</p>	<p>Wakil Ketua Hakim</p>	<p>3 April 2024</p>	<p>21 April 2024</p>
<p>7. Pelatihan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 pada</p>	<p>DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H NURHASANAH, S.H.</p>	<p>Panitera</p>	<p>17 April 2024</p>	<p>21 April 2024</p>

	Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI		Sekretaris		
8.	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	Dr. AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H.	Hakim	20 Mei 2024	22 Mei 2024
9.	Bimbingan Teknis Upaya Hukum Secara Elektronik Bagi Panitera Muda Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2024	DARMAWIYADI, S.H.	Panitera Muda Perkara	20 Mei 2024	22 Mei 2024
10.	Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Kepala Daerah Bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	EKA PUTRANTI, S.H., M.H. RIKI YUDIANDI, S.H.,M.H.	Hakim	20 Mei 2024	22 Mei 2024
11.	Bimtek Persidangan Secara Elektronik (E- Court) dan Pemberkasas/Minu tasi Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	AGUS SUSANTO, S.H SITI NURLAELIYAH, S.H. ELVINA RENTALYA TAMPUBOLON, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	20 Mei 2024	22 Mei 2024

<p>12. Bimbingan Teknis Pendalaman Gugatan Melalui Citizen Law Suit (CLS), Class Action dan Legal Standing bagi Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.</p>	<p>DAFRIAN, S.H. MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H., M.H.</p>	<p>Hakim</p>	<p>26 Juni 2024</p>	<p>28 Juni 2024</p>
<p>13. Pelatihan Dasar (Latsar) Gelombang I secara Blended Learning Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara RI.</p>	<p>HELVAN SUBIA EFFENDI, S.H IMAD AQIL, S.H.</p>	<p>CPNS/Klerek - Analisis Perkara Peradilan</p>	<p>5 Juni 2024</p>	<p>14 September 2024</p>
<p>14. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan III secara Blended Learning Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan dan Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.</p>	<p>TUTI ALAWIYAH, S.E., M.H.</p>	<p>Kepala Sub Bag Umum dan Keuangan</p>	<p>10 Juni 2024</p>	<p>12 Oktober 2024</p>
<p>15. Pelatihan Online Manajemen Risiko Gelombang IX Tahun 2024 pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.</p>	<p>DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.</p>	<p>Panitera</p>	<p>1 Juli 2024</p>	<p>5 Juli 2024</p>

<p>16 Pelatihan Online Manajemen Risiko Gelombang X Tahun 2024 pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.</p>	<p>NURHASANAH, S.H.</p>	<p>Sekretaris</p>	<p>8 Juli 2024</p>	<p>2 Juli 2024</p>
<p>17 Diklat II Program Pendidikan Calon Hakim (PPCH) Terpadu Peradilan Tata Usaha Negara Angkatan IV Gelombang 2 pada Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.</p>	<p>FEBRY INDRA GUNAWAN SITORUS, S.H. ANGGIAN PETER DOLLY SITUMEANG, S.H. INDRA JAYA NATA, S.H. OVI HANIFAH, S.H. SHENNY RUSTAM MOIDADY, S.H. RIZKI MUBAROK, S.H SELEXTA APRILIANI, S.H. NI NENGAH DHEA RISKA PUTRI NANDITA, S.H PUTU CARINA SARI DEVI, S.H. SHAFIRA AMALIA ZAHARA, S.H. MUHAMAD FADILLAH, S.H. ANDI DENI HERWIN, S.H. IRFAN AMOS SAMPE, S.H RIZKY PRATAMA, S.H.</p>	<p>Klerek - Analisis Perkara Peradilan/ Calon Hakim</p>	<p>19 Agustus 2024</p>	<p>11 Oktober 2024</p>

<p>18. Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan bagi Panitera Pengadilan Secara Blended Learning Tahun 2024 pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.</p>	<p>DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.</p>	<p>Panitera</p>	<p>26 Agustus 2024</p>	<p>29 November 2024</p>
<p>19. Sosialisasi Juklak Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara.</p>	<p>Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H. DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H.</p>	<p>Ketua Panitera</p>	<p>22 Agustus 2024</p>	<p>24 Agustus 2024</p>
<p>20. Pembinaan tentang Peran Pengawasan dan Pembinaan Pimpinan dalam Meningkatkan Profesionalisme Hakim dan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.</p>	<p>DAFRIAN, S.H.</p>	<p>Hakim</p>	<p>13 September 2024</p>	<p>15 September 2024</p>
<p>21. Pelatihan Sertifikasi Pertanahan Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Seluruh Indonesia pada Pusdiklat Teknis Peradilan Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.</p>	<p>HARISTOV ASZADHA, S.H. DAFRIAN, S.H.</p>	<p>Hakim</p>	<p>27 September 2024</p>	<p>16 Oktober 2024</p>

<p>22. Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran Periode 23 s.d. 27 September 2024 pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.</p>	<p>SUMARNI ELPRIDA SIANIPAR, A.Md.</p>	<p>Operator – Teknisi Sarana dan Prasarana PTUN Serang</p>	<p>23 September 2024</p>	<p>27 September 2024</p>
<p>23. Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian Angkatan I secara online Tahun 2024 pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan .</p>	<p>PERINA NUR ASSYIFA, S.IP.</p>	<p>Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama</p>	<p>2 Oktober 2024</p>	<p>14 Oktober 2024</p>
<p>24. Bimbingan Teknis Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.</p>	<p>MASURI, S.E. RANDY SETIA PUTRA, S.Kom.</p>	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Pranata Komputer Ahli Pertama</p>	<p>13 November 2024</p>	<p>15 November 2024</p>
<p>25. Pelatihan Teknis Jabatan Fungsional Kepegawaian Angkatan III secara online Tahun 2024 pada Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.</p>	<p>SUFI ARYANI, SE.</p>	<p>Ka. Sub.Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana</p>	<p>1 November 2024</p>	<p>13 November 2024</p>
<p>26. Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Mahkamah Agung RI pada wilayah Banten.</p>	<p>TUTI ALAWIYAH, S.E., M.H. SUMARNI ELPRIDA SIANIPAR, A.Md.</p>	<p>Kepala Sub Bag Umum dan Keuangan Juru Sita Pengganti/Ope rator BM</p>	<p>10 Desember 2024</p>	<p>10 Desember 2024</p>

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. Pengelolaan Keuangan

Anggaran Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2024 tertuang dalam 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024, yaitu:

1. Nomor DIPA-005.01.2.689313/2024 tanggal 24 November 2023 dengan 2 (dua) program kegiatan yakni Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung, dengan alokasi anggaran awal tahun sebesar Rp8.373.420.000,- (*Delapan Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*). Pada akhir tahun mendapat Anggaran Biaya Tambahan berasal dari optimalisasi anggaran Mahkamah Agung RI sebesar Rp1.740.240.000,- (*Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*), sehingga Pagu DIPA Revisi menjadi Rp10.113.660.000,- (*Sepuluh Milyar Seratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah*).
2. Nomor DIPA-005.05.2.690202/2024 tanggal 24 November 2023 dengan 1 (satu) program kegiatan yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) dengan alokasi anggaran awal sebesar Rp50.420.000,- (*Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*). Dalam pelaksanaan anggaran DIPA-05 mengalami kendala untuk merealisasikan pada salah satu Rincian Output yakni Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengajukan pengurangan target rincian output tersebut, sehingga anggaran akhir tahun untuk DIPA-05 menjadi

Rp49.910.000,- (*Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepulu Ribu Rupiah*).

Jumlah keseluruhan alokasi Anggaran dari DIPA 01 dan 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2024 adalah Rp10.163.570.000,- (*Sepuluh Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*). Dari pagu anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp10.015.912.633,- (*Sepuluh Milyar Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Belas Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) atau serapan sebesar 98,55 %.

3. Kinerja Realisasi Anggaran dalam Year on Year (YoY)

Untuk mengukur kinerja realisasi anggaran tahun 2024 terhadap pengelolaan anggaran Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat disandingkan dengan data kinerja realisasi anggaran pada tahun sebelumnya (2023) sebagai berikut:

Tabel 4.1. Kinerja Realisasi Anggaran dalam Year on Year (YoY)

Tahun 2023 dan 2024

Alokasi	DIPA 01 & 05	Realisasi	%
Tahun 2023	8.363.680.000,-	8.209.898.515,-	98,16%
Tahun 2024	10.163.570.000,-	10.015.912.633,-	98,55%
Deviasi Persentase (YoY)			+0,39%

Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa alokasi pagu anggaran pada tahun 2024 mengalami kenaikan namun kinerja terhadap realisasi pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2023 lebih tinggi yakni sebesar *surplus* +0,39%.

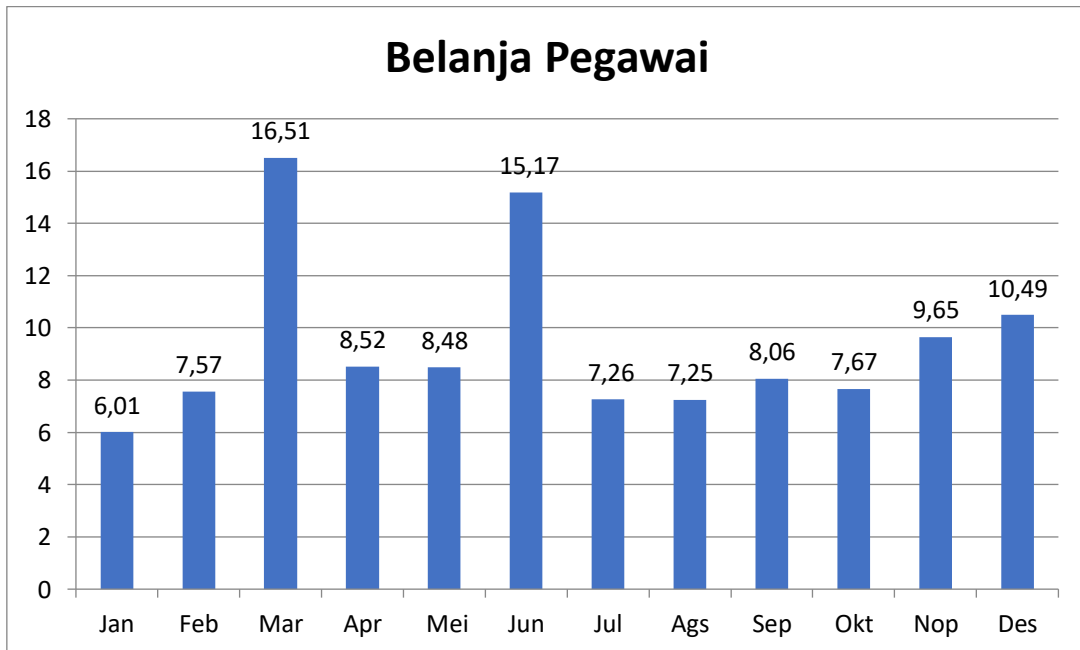
Secara terperinci laporan realisasi penyerapan anggaran dapat disampaikan pada uraian berikut di bawah ini:

Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA-005.01.2.689313/2024 Tanggal 24 November 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun Anggaran 2024.

a) Belanja Pegawai

Tabel 4.2. Realisasi Belanja Pegawai

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET (%)
1	Belanja Pegawai	2023	6.041.067.000,-	5.918.083.897	122.983.103,-	97,96%
		2024	7.844.735.000,-	7.737.287.283	107.447.717,-	98,63%

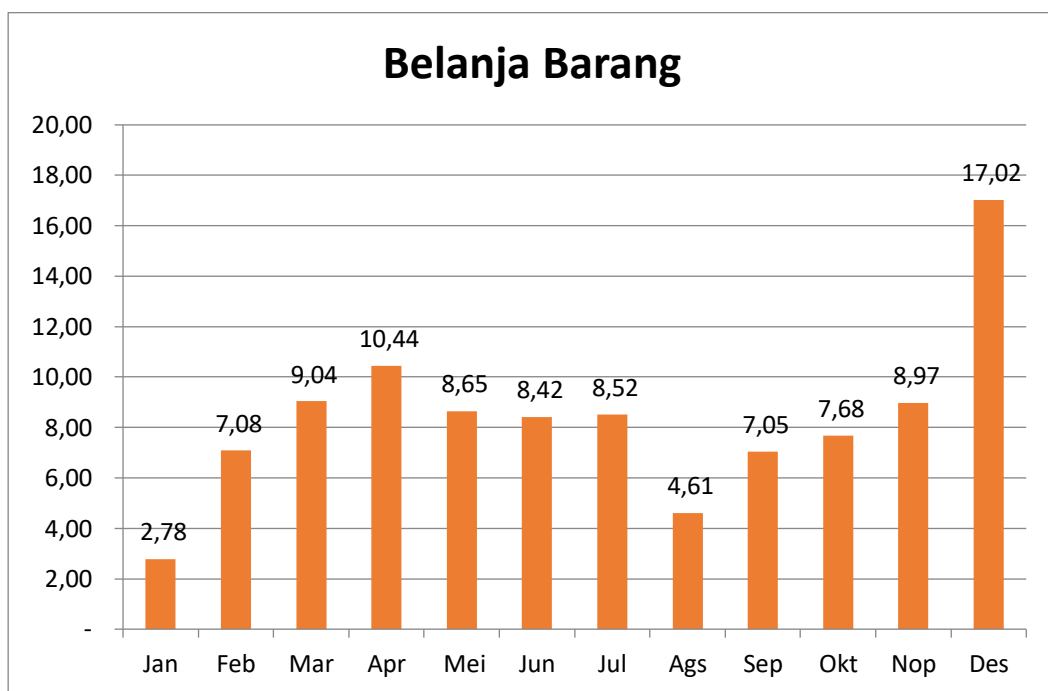


Gambar: 4.1. Grafik Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024

b) Belanja Barang (Operasional dan Pemeliharaan Kantor)

Tabel 4.3. Realisasi Belanja Barang Operasional

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET (%)
1	Belanja Barang	2023	1.999.713.000,-	1,970,409,618,-	29,303,382,-	98,53%
		2024	2.081.688.000,-	2.042.491.350,-	39196.650,-	98,12%



Gambar: 4.2. Grafik Realisasi Belanja Barang Tahun 2024

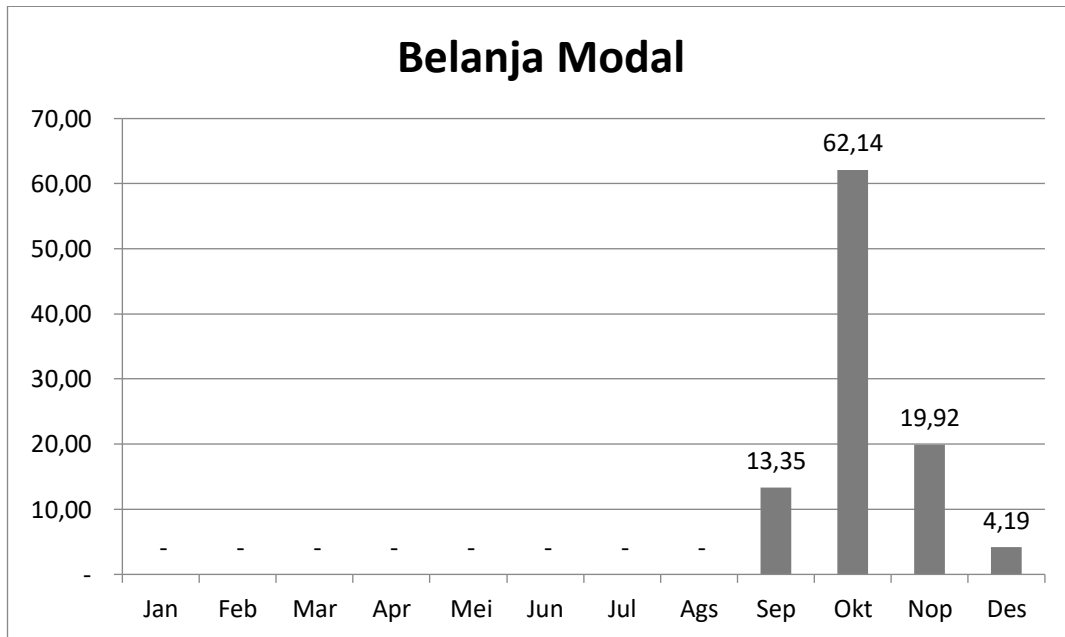
c) Belanja Modal

Untuk program Sarana dan Prasarana Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mendapat alokasi dana sebesar Rp178.237.000,- (*Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) berupa pengadaan kendaraan dinas roda dua dan perangkat pengolah data dan komunikasi berupa 5 (lima) unit Laptop, dan 3 (tiga) unit Personal Komputer yang merupakan anggaran *Reward Sistem Manajen Anti Penyusapan (SMAP)*. Dalam pelaksanaan realisasi belanja modal *Reward SMAP* dapat diefisiensi anggaran sebesar Rp45.900.000,- (*Empat Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*) yang kemudian

diptimalisasikan untuk peralatan mesin yang memang benar-benar dibutuhkan mendesak yaitu pengadaan Printer 3 (tiga) unit, Proyektor Infocus 2 (dua) unit dan Mesin Penghancur Kertas 1 (satu) unit.

Tabel 4.4. Realisasi Belanja Modal

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET (%)
1	Belanja Modal	2023	280.000.000,-	278.748.000,-	1.252.000,-	99,55%
		2024	187.237.000,-	186.480.000	750.000,-	99,60%



Gambar: 4.3. Grafik Realisasi Belanja Modal Tahun 2024

Rekapitulasi Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran DIPA-005.05.2.690202/2024 Tanggal 24 November 2023 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun Anggaran 2024.

Untuk Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) Tahun Anggaran 2024 DIPA awal sebesar Rp50.420.000,- (*Lima Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*). Pada bulan Oktober 2024 sesuai usulan untuk mengurangi volume target pada kegiatan Penyelesaian Perkara Melalui

Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) anggaran setelah revisi menjadi sebesar Rp49.910.000,- (*Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*), dengan capaian penyerapan anggaran sebagai berikut:

Tabel 4.5 Realisasi Belanja Barang Operasional Kepaniteraan

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA DANA (Rp)	KET (%)
1	Belanja Barang Ops.Kepaniteraan	2023	42.900.000,-	42,657,000,-	243.000,-	99,43%
		2024	49.910.000,-	49,654,000,-	256.000,-	99,49%

4. Realisasi Keuangan Perkara

a. Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara

Tabel 4.6 Realisasi Biaya Proses Penyelesaian Perkara

	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Perkara	17.822.800	9.777.500	11.945.000	15.655.300	7.437.800	8.217.500
2	Februari	Biaya Perkara	15.655.300	12.062.500	9.783.000	17.934.800	16.550.800	1.384.000
3	Maret	Biaya Perkara	17.934.800	5.535.500	8.845.000	14.625.300	10.023.300	4.602.000
4	April	Biaya Perkara	14.625.300	6.896.000	10.083.500	11.437.800	1.863.800	9.574.000
5	Mei	Biaya Perkara	11.437.800	13.373.500	14.004.500	10.806.800	4.006.300	6.800.500
6	Juni	Biaya Perkara	10.806.800	14.950.000	8.173.500	17.583.300	14.795.300	2.788.000
7	Juli	Biaya Perkara	17.583.300	7.695.500	4.319.500	20.959.300	10.245.400	10.713.900

8	Agustus	Biaya Perkara	20.959.300	11.585.800	17.927.300	14.617.800	8.045.400	6.572.400
9	September	Biaya Perkara	14.617.800	11.417.800	14.700.800	11.334.800	2.262.400	5.072.400
10	Oktober	Biaya Perkara	11.334.800	16.300.600	9.423.000	18.212.400	12.168.700	6.043.700
11	November	Biaya Perkara	18.212.400	7.051.000	7.824.500	17.888.900	15.716.400	2.172.500
12	Desember	Biaya Perkara	17.888.900	12.678.820	11.904.340	18.663.380	11.413.520	7.249.900

b. Realisasi Biaya Eksekusi

Tabel 4.7 Realisasi Biaya Eksekusi

	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan					
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir	Kas di Bank	Kas di Brankas
1	Januari	Biaya Eksekusi	685.000	-	-	685.000	685.000	-
2	Februari	Biaya Eksekusi	685.000	-	-	685.000	685.000	-
3	Maret	Biaya Eksekusi	685.000	300.000	120.000	865.000	865.000	-
4	April	Biaya Eksekusi	865.000	342.500	120.000	1.087.500	1.087.500	-
5	Mei	Biaya Eksekusi	1.087.500	20.000	-	1.107.500	1.107.500	-
6	Juni	Biaya Eksekusi	1.107.500	-	-	1.107.500	1.107.500	-
7	Juli	Biaya Eksekusi	1.107.500	1.000.000	163.000	1.944.500	1.944.500	-
8	Agustus	Biaya Eksekusi	1.944.500	910.000	540.000	2.314.500	2.314.500	-
9	September	Biaya Eksekusi	2.314.500	-	63.000	2.251.500	2.251.500	-

10	Oktober	Biaya Eksekusi	2.251.000	575.000	160.000	2.666.500	2.666.500	-
11	November	Biaya Eksekusi	2.666.500	71.900	-	2.738.400	2.738.400	-
12	Desember	Biaya Eksekusi	2.738.400	500.000	169.500	3.068.900	3.068.900	-

5. Pengelolaan PNB

Selain mengelola anggaran yang berasal dari Rupiah Murni (RM) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang turut serta dalam pengelolaan anggaran yang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam kurun waktu 2024 rincian capaian PNB dari DIPA (01) dan DIPA (05) adalah sebagai berikut:



6. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi

kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pada prinsipnya, penilaian IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran satu tahun anggaran penuh, hal tersebut telah tertuang dalam matrik Rencana Strategis 2020-2024 Satker Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Tabel 4.8. Matrik Target IKPA pada Renstra 2020-2024 PTUN Serang

No	Tujuan		Target (angka Menengah) (3 Tahun)	Sasaran		Target (M)					Strategi									
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2023		Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)				
			Jumlah											Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	
5	Tercapainya salurannya pelaksanaan tugas Mahkamah Agung	Nilai KTA DIPA-01 dan DIPA-05	95	Menghimpun pengalihan keuangan	Nilai KTA DIPA-01	95	95	95	95	95	Program Dukungan Masyarakat	Perbaikan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah Layanan Pelanggaran	1	Jumlah	2020	2021	2022	2023	2024
				Nilai KTA DIPA-05	91	80	80	80	80	1				Jumlah	2020	2021	2022	2023	2024	
				Menghimpun pengalihan aset	Persentase realisasi output pengalihan BUA	100	99,99	99,99	99,99	99,99	Program Dukungan Masyarakat	Perbaikan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Jumlah BMN	5	Unit	2020	2021	2022	2023	2024

Adapun capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tahun anggaran 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

- **DIPA-01**

Tabel 4.9. Nilai IKPA DIPA 01

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode SA	Kode Subsidi	Uraian Subsidi	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Efisiensi Bobot	Disponansi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Maksimal B DIPA	Penyempitan Anggaran	Belanja Realisasi	Penyimpangan Tagihan	Pengeluaran UP dan TUP					
1	020	305	600010	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	Nilai	100,00	94,74	98,28	80,00	100,00	99,90	100,00	97,05	100%	0,90	97,05
					Gesok	10	15	20	10	18	10	20				
					Nilai Akas	10,00	11,21	13,06	0,00	13,06	0,90	25,00				
					Nilai Aspek	97,27			94,77			100,00				

Berdasarkan tabel di atas IKPA tahun anggaran 2024 adalah sebesar 97,05. Hal tersebut menggambarkan bahwa capaian IKPA DIPA-01 tahun 2024 melampaui dari yang ditargetkan pada angka 95,00 yang tertuang pada matrik rencana strategis 2020-2024.

- **DIPA-05**

Tabel 4.10. Nilai IKPA DIPA 05

Samudra, Desember

No	Kode IKPA	Kode DA	Kode Satker	Uraian Satker	Kategori	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dipenuhi SPN (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Detail Halusas II DIPA	Penyusunan Anggaran	Belanja Kontrolled	Penyelesaian Tagihan	Penyelesaian UP dan TSP					
1	300	085	806202	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG	Nilai	100,00	34,89	100,00	0,00	8,08	95,71	100,00	70,71	80%	0,00	98,47
					Bobot	18	15	20	0	8	10	20				
					Nilai Akhir	13,00	14,20	20,00	0,00	8,08	9,57	20,00				
					Nilai Aspek	87,35		87,85		100,00						

Dari tabel di atas dapat dilihat IKPA tahun 2024 sebesar 98,47 sehingga disimpulkan bahwa capaian IKPA tahun anggaran 2024 untuk DIPA-05 jauh melampaui target yang dicanangkan dalam Matrik Renstra 2020-2024 yang ditargetkan di angka 80,00.

Hal ini terjadi disebabkan pada pelaksanaan anggaran tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang mengajukan revisi anggaran berupa permintaan pengurangan target pada salah satu volume rincian output yakni RO Penyelesaian Perkara Melalui Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) yang telah diprediksi Satker kesulitan untuk merealisasikannya.

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung dan Kendaraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menempati tanah dan bangunan sendiri dimana status kepemilikan sudah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI.

1) Tanah dan Bangunan Gedung

Tabel 4.11. Keadaan Sarana dan Prasarana Tanah dan Gedung

No.	Satker	Luas Tanah (m ²)	Bangunan (m ²)	Peruntukan	Pemegang Hak Atas Tanah
1	PTUN Serang	4.242 m ²	1.572 m ²	Gedung Kantor	Pemerintah RI Cq. MA RI

Kondisi saat ini prasarana tanah dan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan luasan 555 m² terkena dampak pelebaran jalan program pembangunan Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2016, namun karena lahan pengganti belum tersedia pelebaran jalan di depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum dilaksanakan. Hingga tahun 2024 penggantian lahan yang telah disepakati masih dalam proses negosiasi harga antar pemilik tanah dengan Pemerintah Provinsi Banten.

2) Rumah Negara

Tabel 4.12. Keadaan Sarana dan Prasarana Rumah Negara

No.	Satker	Jumlah	Kondisi			Pemegang Hak Atas Tanah
			Baik	Rusak	Rusak Berat	
1	PTUN Serang		N I H I L			

3) Kendaraan Dinas Roda 2

Tabel 4.13. Keadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Roda 2

No.	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	Honda	E1F02N 12M2 A/T	1 Unit	Baik
2	Honda	MEGA PRO III	1 Unit	Rusak (Proses Penghapusan)
3	Honda	Vario A/T	1 Unit	Baik

4) Kendaraan Dinas Roda 4

Tabel 4.14. Keadaan Sarana dan Prasarana Kendaraan Dinas Roda 4

No.	Merk	Type	Jumlah	Kondisi
1	Toyota	New Avanza Veloz 1.5 M/T	1 Unit	Baik
2	Toyota	Corolla Altis 1.8J M/T	1 Unit	Baik
3	Toyota	New Vios 1.5G M/T	1 Unit	Rusak
4	Toyota	Kijang Innova G 2.0 M/T	1 Unit	Baik

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.15. Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

No.	Jenis Pemeliharaan	Ket. Pelaksanaan
1	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	
	- Pemeliharaan Toilet Pengunjung	Januari
	- Pemeliharaan Bangunan Musholla	Februari dan April
	- Pemeliharaan Area Parkir	Maret
	- Pemeliharaan Toilet Pria Lantai I	April
	- Pemeliharaan Toilet Wanita Lantai I	Mei
	- Pemeliharaan Pagar Kantor	Mei
	- Pemeliharaan Toilet Ruang Sidang Online, Ruang Sidang Utama dan Toilet Satpam	Juni
	- Pengecatan Dinding Area Lobby Depan dan Lobby Belakang	Juli
	- Pemeliharaan Lapangan Kantor	Juli
	- Pengecatan Area Drop Off dan Pemeliharaan Membran Kanopi	Agustus
	- Pemeliharaan Bak Sampah, Pintu Sekat Toilet Pengunjung	September
	- Pemeliharaan Alat Penangkal Petir	September

	- Pemeliharaan Lampu PJU, Lampu Gedung dan Pengecatan Plafond Ruang Hakim	Oktober
	- Pemeliharaan area halaman kantor (penebangan pohon)	November
	- Pengecatan pagar depan, perbaikan papan nama huruf kantor, tambal dak beton, perbaikan tiang parkir mobil hakim	Desember

c. Penambahan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.16. Penambahan/Hibah Sarana dan Prasarana Gedung

No.	Tanggal	Jenis Barang	Ket
1	10-09-2024	Kendaraan Roda Dua	Aset kapitalisasi
2	15-10-2024	Laptop 5 Unit	Aset kapitalisasi
3	27-10-2024	Personal Komputer 3 Unit	Aset kapitalisasi
4	11-11-2024	Printer 3 Unit	Aset kapitalisasi
5	25-11-2024	Proyektor Infocus 2 Unit	Aset kapitalisasi
6	16-12-2024	Alat Penghancur Kertas 1 Unit	Aset kapitalisasi

d. Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung

Tabel 4.17. Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Gedung

No.	Tanggal	Jenis Barang	Ket
		N I H I L	

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Hal-hal yang dapat menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas Pengadilan antara lain adanya sarana dan prasarana fasilitas penunjang.

Dalam hal ini sarana dan prasarana fasilitas gedung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Keadaan, Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.18.Keadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No.	Nama Barang	Jumlah	Tahun Pengadaan	Keterangan
1	Personal Computer	15	2012 – 2024	Baik
2	Laptop	19	2012 – 20124	Baik
3	Infocus	2	2024	Baik
4	PABX	1	2023	Baik
5	AC	31	2014 - 2021	Baik
6	Faximile	2	2014	Rusak
7	CCTV	25	2016-2024	Baik
8	Sound system	1	2014	Baik
9	Mesin Absensi	2	2020	Baik
10	Tabung Pemadam Api Ringan	3	2018-2022	Baik
11	Genset Besar	1	2023	Baik
12	Genset Kecil	1	2012	Rusak
13	Camera Web	1	2014	Baik
14	Monitor Informasi	12	2014 – 2019	Baik
15	Brankas	1	2012	Baik
16	Mesin Antrian Sidang	1	2022	Baik
17	Printer	15	2018 - 2024	Baik
18	Peralatan disabilitas	4	2022	Baik
19	Tabung oksigen	1	2020	Baik
20	Access Door	3	2021	Baik
21	Sound system	1	2018	Baik
24	UPS	5	2021	Baik
25	Alat Penghancur Kertas	1	2024	Baik

b. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel 4.19. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No.	Pemeliharaan Sarana	Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Servis Laptop												
2.	Servis PC Unit												
3.	Pemeliharaan Genset												
4.	Perbaikan Kend. Dinas Roda 4												
5.	Perbaikan Kend. Dinas Roda 2												
6.	Perbaikan CCTV												
7.	Perbaikan AC Split & Kaset												
8.	Pemeliharaan Printer												
9.	Servis UPS												
10.	Servis Sound system												
11.	Pemeliharaan Jaringan Telepon (PABX)												
12.	Perbaikan mesin pompa air												
13.	Perbaikan inventaris kantor												

c. Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

Tabel. 4.20. Kegiatan Penghapusan Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

No.	Tanggal	Jenis Barang	Ket
		N I H I L	

C. Pengelolaan Teknologi Informasi

Dalam rangka mendukung administrasi perkara berbasis elektronik khususnya pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan

E-Court dukungan Teknologi informasi mutlak dibutuhkan. Pembenahan dan peningkatan teknologi informasi merupakan salah satu prioritas demi terwujudnya keterbukaan informasi, akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta menjadi Pengadilan yang modern dengan berbasis Teknologi Informasi terpadu yang hal tersebut selaras dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi, sebagaimana telah diubah dengan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/ VIII/2024 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pada Pengadilan.

Sebagai penunjang utama terhadap kelancaran dan kemudahan pelayanan publik, sampai dengan tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menerima/melaksanakan pengadaan berupa perangkat-perangkat keras yang memadai seperti personal komputer, printer dan terus mengadakan *update* serta sinkronisasi data secara berkala dengan Mahkamah Agung RI.

Keadaan perangkat teknologi informasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.21. Keadaan Perangkat Teknologi Informasi

Satker	Keadaan Teknologi Informasi dan Pendukungnya								
	Internet	Server	PC	Laptop	Printer	Access Point	Router	Switch Hub	Layar Informasi
PTUN Serang	150 Mbps	3	18	24	17	19	1	2	7



Gambar 4.4. Ruang Server PTUN Serang



Gambar 4.5. Server PTUN Serang

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
 Jalan Cendekia No.101 Serang, Serang, Banten 42125
 www.pmn-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

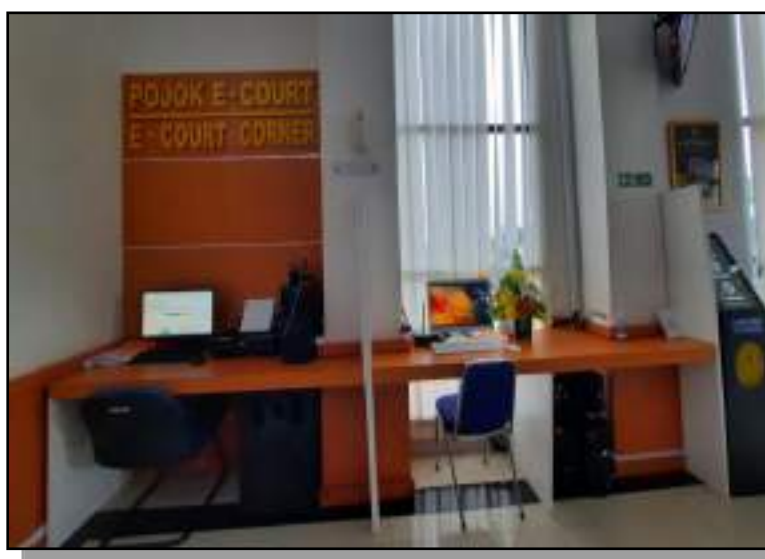
FORM CHECKLIST TATA KELOLA INFRASTRUKTUR TI, SISTEM KEAMANAN JARINGAN DAN SISTEM APLIKASI

NO	ITEM	STATUS MONITORING																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	1. Apakah Server dalam keadaan online?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Apakah semua indikator yang terdapat online?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3. Apakah CPU dan Storage terdapat online?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4. Apakah kapasitas Storage masih aman?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
B	1. Apakah jaringan internet berfungsi dengan baik?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Apakah Perangkat Server berfungsi dengan baik?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3. Apakah Perangkat Perawat berfungsi dengan baik?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4. Apakah Perangkat Jaringan berfungsi dengan baik?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
C	1. Apakah semua aplikasi pada server dalam keadaan online?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Apakah tidak ada data yang hilang atau rusak?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3. Apakah tidak ada data yang hilang atau rusak?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4. Apakah tidak ada data yang hilang atau rusak?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
D	1. Apakah tidak ada data yang hilang atau rusak?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Apakah tidak ada data yang hilang atau rusak?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3. Apakah tidak ada data yang hilang atau rusak?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4. Apakah tidak ada data yang hilang atau rusak?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Gambar 4.6. Lembar Ceklist Monitoring TIK

1. Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Serang

E-Court merupakan instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, secara garis besar proses e-Court dimulai pendaftaran perkara secara online (*e-filing*), pembayaran panjar perkara elektronik (*e-payment*), pengiriman dokumen secara online, pemanggilan secara online (*e-summons*), persidangan secara elektronik (*e-litigation*) dan penyampaian putusan secara online.



Gambar 4.7 Meja e-Court



Gambar 4.8. Mesin informasi e-Court

Dalam implementasinya untuk tahun 2024 Perkara yang terdaftar melalui e-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.22. Jumlah Perkara Terdaftar Melalui E-Court

Tahun	Perkara Sisa dan Masuk	Putus/Dismissal/ Cabut/Perlawanan	Sisa Perkara
2024	67	Putus 29 Dismissal 7 Cabut 18 Perlawanan 1	12

2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Serang

Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan wujud integrasi teknologi informasi dengan ragam regulasi di bidang administrasi perkara. Sampai dengan akhir tahun 2024 aplikasi SIPP yang digunakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menggunakan SIPP Versi 5.6.4.

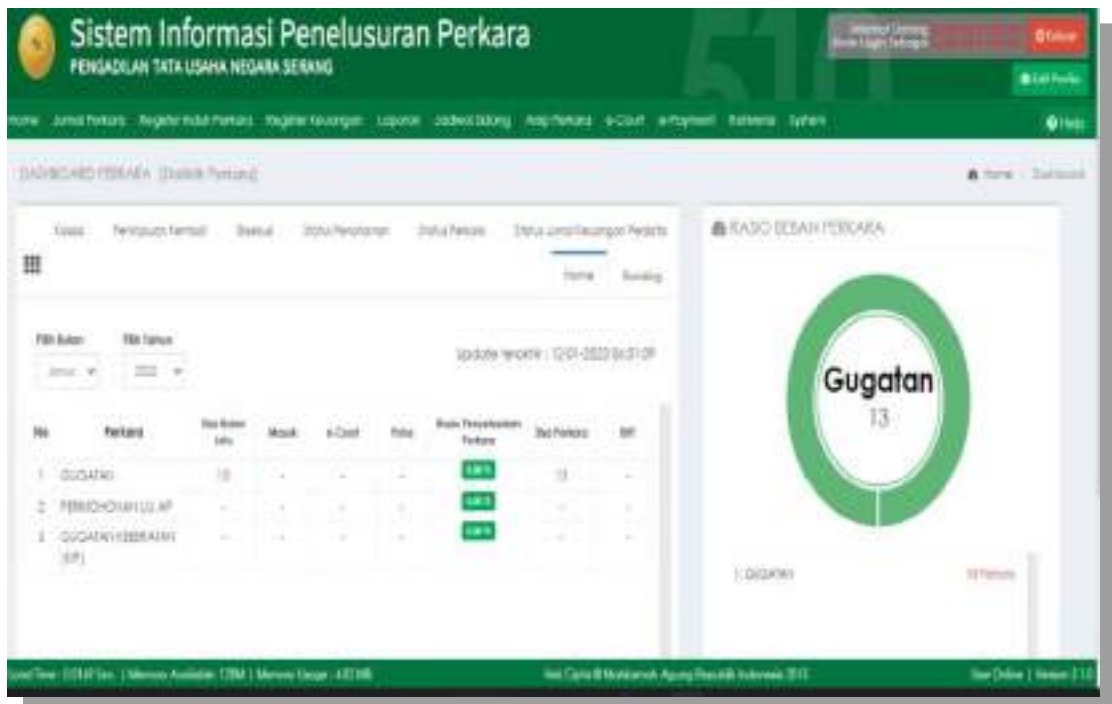
Aplikasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terkoneksi dengan SIPP Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga informasi perkara dapat diakses para pihak pencari keadilan cukup melalui SIPP baik itu proses pada tingkat pertama maupun

banding. Disamping itu, putusan yang diupload ke SIPP secara otomatis juga terupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Secara rutin database SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan sinkronisasi, baik ke tingkat banding maupun ke Mahkamah Agung RI. Alamat SIPP Web pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

Tabel 4.23. Alamat SIPP Web Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Satker	Alamat SIPP
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	http://192.168.51.2/SIPP32



Gambar 4.9. Antar Muka Aplikasi SIPP PTUN Serang



Gambar: 4.8. Antar Muka Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP PTUN Serang

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. Akreditasi Penjaminan Mutu

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Program akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini terus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan.

Dasar pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor: 1142/DJMT.3/B/9/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pelaksanaan Akreditasi Tahun Anggaran 2017.

Akreditasi penjaminan mutu yang berprinsip inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan telah dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2020 dan memperoleh hasil penilaian A (Excellent) hasil tersebut mengulangi/mempertahankan penilaian yang telah diperoleh sebelumnya pada tahun 2018, dengan kriteria penilaian yang digunakan meliputi 7 (tujuh) area yaitu: 1) Manajemen Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia, 2) Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara, 3) Sarana dan Prasarana Pengadilan, 4) E-Judicary, 5) Layanan Pengadilan, 6) PNBPN dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, 7) Survei Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat.



Gambar 5.1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu

Program akreditasi penjaminan mutu di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang telah berjalan dan banyak diraih oleh satuan kerja secara substansi memiliki kesamaan maksud, tujuan, data dan sumber data dengan program reformasi birokrasi yang diimplementasikan dalam pembangunan zona integritas maka perlu dilakukan integrasi dari kedua program tersebut untuk mengefisienkan pengelolaan dan memudahkan satuan kerja di daerah untuk tidak perlu berkali-kali menyediakan data yang pada hakekatnya sama tetapi dipergunakan untuk tujuan yang berbeda-beda.

Seiring berjalannya program zona integritas menuju WBK-WBBM Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menatalaksanakan program akreditasi penjaminan mutu yang telah ada, maka tahun 2024 tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur dan Risk Register yang telah disusun oleh Satker, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan. Monev juga dapat membantu mengidentifikasi masalah yang muncul sehingga dapat segera ditangani.

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Pelayanan Publik di setiap instansi terus ditingkatkan dan dipermudah, saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal permohonan sampai akhir/diterbitkannya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat.



Gambar 5.2. Meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinatif, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku.



Gambar 5.3. Mesin Nomor Antrian Pengunjung

Penerapan PTSP sendiri tidak lain memiliki tujuan untuk: 1) Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai standar yang telah ditetapkan, 2) Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, kolusi, nepotisme. Selain itu, aspek penting dilaksanakannya program PTSP ini merupakan wujud dari pelayanan publik yang prima dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan atau kebutuhan-kebutuhan yang diselenggarakan oleh lembaga Pengadilan terhadap para pihak yang mencari keadilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 5.1. Jumlah Permohonan Layanan PTSP Tahun 2024

No.	Jenis Layanan	Jumlah Permohonan Layanan	Ket
1	Layanan Umum/Persuratan	- 872 Surat Masuk - 1.820 Surat Keluar	-
2	Layanan Hukum	- 16 Permohonan Informasi - 165 Pendaftaran Surat Kuasa - 17 Permohonan Pengambilan Salinan Putusan - 22 Surat Keterangan Bebas Perkara	-
3	Layanan Perkara/Meja I	- 55 Gugatan Perkara Tingkat Pertama	-
4	Layanan Perkara/Meja III	- 15 Banding - 14 Kasasi	-

		- 7 Peninjauan Kembali - 9 Permohonan Eksekusi	
5	Layanan Perkara/Kasir	- Rp4.815.000,- PNBP Biaya Perkara - Rp7.332.500,- PNBP Salinan Putusan - Rp21.857.500,- Pengembalian Sisa Panjar	-

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengembangkan PTSP secara online, untuk lebih memudahkan para pencari keadilan yang memerlukan informasi dapat terlayani tanpa harus mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Hal tersebut dirasa lebih efektif dan efisien.



Gambar 5.4. Tampak Muka Aplikasi PTSP Online

Adapun fitur-fitur PTSP secara online yang dapat diakses oleh para pencari keadilan adalah sebagai berikut:

- Layanan informasi melalui sambungan telepon/*voice call* (0254) 214085

LAYANAN PTSP ONLINE



Voice Call

Layanan Informasi Melalui Telepon.

(0254) 214085

Gambar 5.5. Layanan Voice Call PTSP Online

- Layanan informasi melalui *video call* melalui Zoom.



Video Call

Layanan Informasi Melalui ZOOM.

Buka Aplikasi Zoom

Gambar 5.6. Layanan Video Call PTSP Online

- Layanan Informasi melalui Online Chat



Online Chat

Layanan Informasi Melalui Chat

Klik Mulai Percakapan/Kirim Pesan

Gambar 5.7. Layanan Online Chat PTSP Online

C. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berupaya menciptakan aplikasi layanan pendukung dan juga aplikasi-aplikasi lain yang merupakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan telah diterapkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu :

No	Uraian	Keterangan
1.	<p>OneTUN https://onetun.ptun-serang.go.id</p> <p>(Satu Akses Layanan TUN Serang)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem aplikasi layanan pemberian Surat Keterangan Bebas Perkara dan Salinan Putusan secara elektronik tanpa harus datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga lebih efektif, aman dan akuntabel. - Fitur: <ul style="list-style-type: none"> • Pengajuan Surat Keterangan Bebas perkara • Pengajuan Salinan Putusan



Gambar: 5.8. Tampilan Aplikasi OneTUN

2. #jaWAra# Asisten Digital PTUN Serang
- Aplikasi pencarian data Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berbasis Bot WhatsApp adalah program atau perangkat lunak chatbot yang dapat digunakan secara khusus dalam aplikasi perpesanan terenkripsi WhatsApp populer, baik yang dapat diakses oleh publik ataupun keperluan internal.
 - Bertujuan membantu masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan data informasi perkara secara lebih cepat serta meningkatkan kecepatan pelayanan publik dan keterbukaan terkait pelayanan pengadilan.



Gambar: 5.9. Aplikasi Asisten Digital jaWAra

3. Survei Indeks Persepsi Korupsi & Persepsi Kualitas Pelayanan Elektronik
4. Daftar Buku Tamu Elektronik
5. Daftar Hadir Persidangan Elektronik 'e-Attendance'
6. Service Rating Elektronik
- Dalam rangka pencegahan Covid-19, pelayanan PTSP menerapkan mekanisme "TOUCH LESS" dengan menscan QR Code untuk mengakses layanan yang tersedia



Gambar: 5.10. Aplikasi Inovasi Akses Layanan *Touchless*

7. SIMKARA

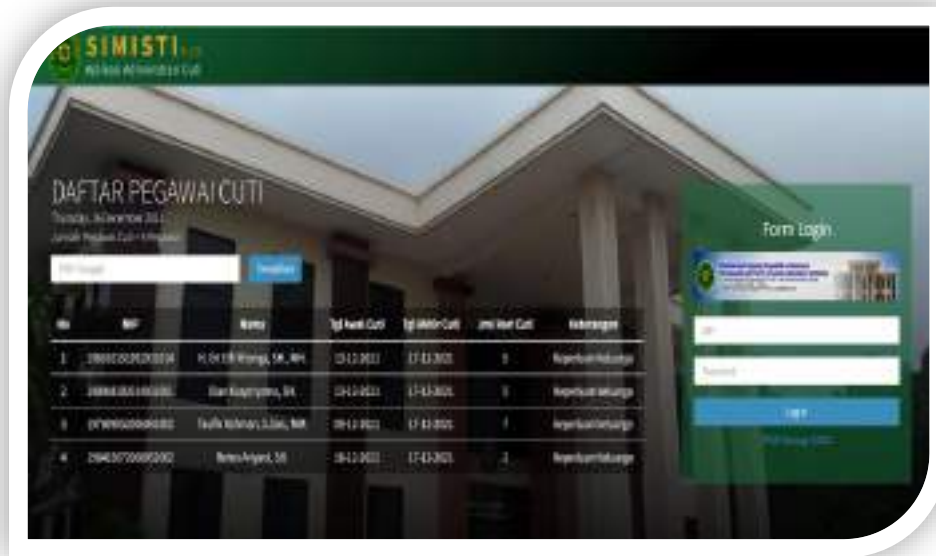
Sistem aplikasi berbasis Web untuk Informasi Kehadiran Para Pihak Berperkar dalam Persidangan



Gambar: 5.11. Tampak muka aplikasi SIMKARA

8. SIMISTI

Aplikasi berbasis Web untuk administrasi pelayanan cuti aparatur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Gambar: 5.12. Tampak muka aplikasi SIMISTI

9. SIDAPAT

Sistem aplikasi bank data berbasis Web untuk unggah Arsip Digital dan Laporan secara mandiri dari tiap unit kerja.



Gambar: 5.13. Modul User aplikasi SIDAPAT

10. SIMARJAN

Aplikasi berbasis Web merupakan sistem monitoring dan evaluasi kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).



Gambar 5.14. Menu Login Aplikasi SIMARJAN

11. SEMPURNA

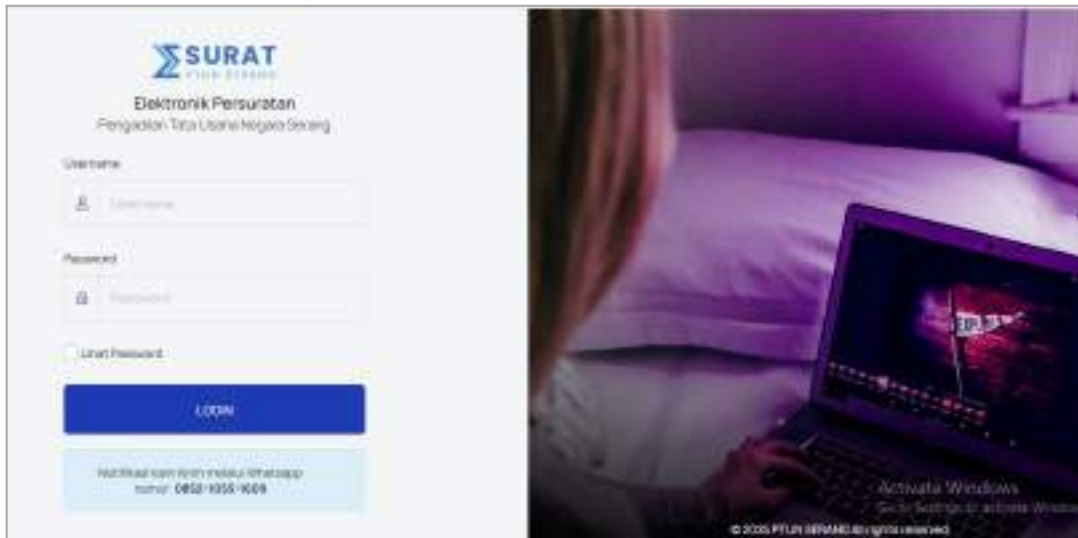
Adalah layanan komunikasi dengan petugas PTSP melalui beragam channel komunikasi (PTSP Online).



Gambar: 5.15. Tampak muka aplikasi PTSP Online (SEMPURNA)

12. E-SURAT

Merupakan aplikasi sistem Tata Persuratan secara elektronik.



Gambar: 5.16. Tampilan Aplikasi Tata Persuratan PTUN Serang

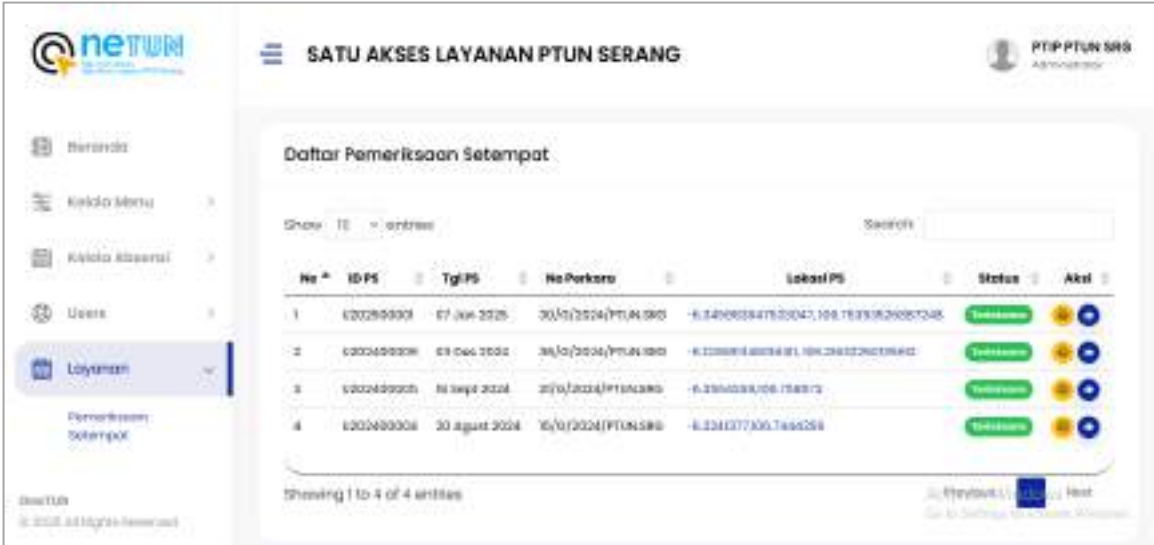
13. PPID PTUNSRG Berbasis Web dan Android

Sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang dikelola sebagai dokumen informasi yang dimiliki oleh badan publik, berbasis web dan tersedia dalam basis android yang dapat diunduh pada playstore.



Gambar: 5.17. Tampilan Sistem PPID PTUN Serang

14. E-PS
Elektronik Persidangan Setempat
- Sistem Pengelolaan Data Absensi, Pelaporan dan Monitoring Kegiatan Persidangan Setempat secara online.



The screenshot displays the 'SATU AKSES LAYANAN PTUN SERANG' interface. The main content area is titled 'Daftar Pemeriksaan Setempat' and shows a table with the following data:

No	ID PS	Tgl PS	No Perkara	Lokasi PS	Status	Aksi
1	6202400001	07 Jun 2024	20/1/2024/PTUN SRG	+6281000347820047,100.75331020007045	Terselesa	[Icons]
2	6202400002	08 Jun 2024	20/1/2024/PTUN SRG	+6281000347820047,100.75331020007045	Terselesa	[Icons]
3	6202400003	08 Sept 2024	20/1/2024/PTUN SRG	+6281000347820047,100.75331020007045	Terselesa	[Icons]
4	6202400004	30 agust 2024	16/1/2024/PTUN SRG	+6281000347820047,100.75331020007045	Terselesa	[Icons]

The interface also includes a sidebar with navigation options like 'Beranda', 'Kekoa Menu', 'Kekoa Absensi', 'Utama', and 'Layanan'. The bottom of the page shows 'Showing 1 to 4 of 4 entries' and a footer with 'PTUN SERANG' and '2024-08-10 10:00:00'.

Gambar: 5.18. Tampilan Sistem E-PS PTUN Serang

D. Capaian Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Dalam Pelayanan Publik

d.1. Pembangunan Zona Integritas (ZI)

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selalu berkomitmen untuk mendorong pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan. Secara umum program ini telah mendorong perbaikan dan peningkatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik, menjamin eksistensi birokrasi yang anti korupsi, birokrasi yang berkualitas serta birokrasi yang memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan publik dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Pada tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) merupakan predikat yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen kuat untuk memberantas praktek korupsi serta peningkatan pelayanan melalui reformasi birokrasi.

Menyempurnakan capaian pembangunan Zona Integritas yang telah dibangun, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah menggenapinya dengan raihan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tahun 2022.

Implementasi pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pasca predikat WBBM yang telah diraih pada tahun 2024 telah diadakan kegiatan monitoring dan evaluasi Pembangunan Zona Integritas oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI bertujuan untuk mempertahankan pembangunan Zona Integritas antara lain:

- Mempertahankan peningkatan komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai satuan kerja.
- Meningkatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja pada satuan kerja.
- Mempertahankan penurunan risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.



Gambar 5.19. Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi Zona Integritas WBK-WBBM Pengadilan Tata Usaha Negara Serang oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Tahun 2024

d.2. Penganugerahan Sebagai Badan Publik Informatif



Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBN dan/atau APBD), atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan wajib disediakan, diberikan, dan/atau diterbitkan oleh badan publik kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tetap berkomitmen untuk mengimplementasikan secara sungguh-sungguh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor: 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penyelenggaraan *core businessnya* dengan komitmen dan dukungan dari semua lini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kembali berhasil mempertahankan kualifikasi badan publik informatif tahun 2024 pada Monitoring dan Evaluasi Badan Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Banten tahun 2024 dengan jadwal rangkaian monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

Tabel 5.2. Jadwal Rangkaian Monitoring dan Evaluasi Badan Publik

No	Tanggal	Kegiatan
1.	22-30 Agustus 2024	Sosialisasi Monev
2.	17 Sep - 4 Oktober 2024	Pemantauan Website Badan Publik
3.	29 Oktober 2024	Presentasi Lembaga Non Struktural (LNS)/Vertikal
4.	11 - 27 November 2024	Visitasi Lembaga Non Struktural (LNS)/Vertikal
5.	10 Desember 2024	Penganugerahan Badan Publik

Keberhasilan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang meraih kualifikasi badan publik informatif pada tahun 2024 untuk kategori Lembaga Non Struktural/Vertikal dapat dijadikan tolak ukur bahwa lembaga Peradilan semakin terbuka pada aspek penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagai wujud pemenuhan dan kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Gambar: 5.20. Sertifikat Penganugerahan sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2024

- d.3. Meraih Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Peringkat terbaik ke-I untuk Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Beban Perkara 51-100 dari Mahkamah Agung RI



Gambar: 5.21. Piagam Penghargaan Peringkat I Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori PTUN Beban Perkara 51-100 Tahun 2024

- d.4. Meraih Peringkat terbaik ke-I Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 51-100 Tahun 2024.



Gambar: 5.22. Piagam Penghargaan Terbaik ke I Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Survei Kepuasan Masyarakat Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 51-100 Tahun 2024

d.5. Meraih Peringkat terbaik ke-III Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Eksekusi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 51-100 Tahun 2024



Gambar 5.23

Piagam Penghargaan Peringkat terbaik ke-III Penerima Anugerah Sebagai Pengadilan Terbaik Dalam Pelaksanaan Kinerja Eksekusi Kategori Pengadilan Tata Usaha Negara Dengan Beban Perkara 51-100 Tahun 2024

- d.6. Meraih Juara ke-III Lomba Peningkatan Pelayanan Peradilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2024 dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara.



Gambar 5.24 Piagam Penghargaan Juara ke-III Kegiatan Lomba Peningkatan Pelayanan Peradilan Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2024

d.7. Meraih Piala Bergilir Gubernur Banten sebagai badan publik informatif kategori Lembaga Non Struktural (LNS)/Vertikal dari Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2024.



Gambar 5.25 Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima Piala Bergilir Gubernur Banten sebagai badan publik informatif kategori Lembaga Non Struktural (LNS)/Vertikal dari Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2024

d.8. Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memperoleh predikat sebagai PPID Terbaik dari Komisi Informasi Provinsi Banten kategori Lembaga Non Struktural (LNS)/Vertikal Tahun 2024.



Gambar 5.26 Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dinobatkan sebagai Petugas PPID Terbaik oleh Komisi Informasi Provinsi Banten Tahun 2024



Gambar 5.27 Sertifikat Penghargaan Sebagai Petugas PPID Terbaik Kategori Lembaga Non Struktural (LNS)/Vertikal Tahun 2024

d.9. Satuan Kerja yang berhasil menerapkan program Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

d.9.1 Deskripsi tentang proses pembangunan SMAP di PTUN Serang



Pembangunan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dimulai dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI Nomor 20/BP/SK/III/2024 tentang Penunjukan 16 (Enam Belas) Pengadilan Tingkat Pertama

Untuk Menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pada Tahun 2024 tanggal 21 Maret 2024. Segera setelahnya, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerbitkan kebijakan anti penyuapan dan membentuk Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan menerbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: W2TUN7/653/OT.00/IV/2024 tentang Pembentukan Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, tanggal 12 April 2024. Tim SMAP terdiri dari Manajemen Puncak, Ketua Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP), Internal Auditor, Tim Pembangun Integritas dan *Document Control* yang masing-masing memiliki tugas tersendiri. Tim SMAP selanjutnya ditugaskan untuk mengikuti Pelatihan/*Training* secara *asynchronous* yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI) melalui portal website Elearning SMAP Mahkamah Agung: <https://smap.mahkamahagung.go.id/elearning> serta mengikuti sosialisasi dari Bawas MA RI secara daring. Pasca mengikuti kegiatan pelatihan dan sosialisasi yang cukup, Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Ibu Nelvy Christin, S.H., M.H. sebagai Ketua FKAP secara bertahap melaksanakan kegiatan pembangunan SMAP. Adapun tahapan kegiatan yang dilaksanakan

dalam proses pembangunan SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Penandatanganan Komitmen Bersama dan Pakta Integritas

Seluruh aparatur, baik Hakim maupun Pegawai, menandatangani komitmen bersama dan pakta integritas yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2024. Komitmen bersama dan pakta integritas ini di dalamnya memuat ikrar bahwa seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan mematuhi dan menjaga integritasnya dalam upaya implementasi SMAP.

b. Pemenuhan Dokumen SMAP

Pada tahap ini Tim SMAP mulai menyusun kebijakan dan pedoman SMAP serta meneliti dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pembangunan SMAP, dokumen tersebut yakni Manual SMAP, Sasaran SMAP, Standar Operasional Prosedur (SOP) SMAP, *Risk Register* Anti Penyuapan, dan Surat-surat keputusan atau kebijakan internal serta dokumen lainnya yang terkait SMAP. Proses pengerjaan dilakukan selama bulan April hingga Mei 2024 dengan melibatkan tidak hanya Tim SMAP, melainkan tim-tim lain yang terkait, seperti Tim Penyusun SOP dan Tim Manajemen Risiko. Hasil akhir penyusunan dokumen-dokumen tersebut selanjutnya dikelola dan dikendalikan oleh Tim *Document Control* SMAP.

c. Penandatanganan Pakta Integritas Pihak Ketiga

Para Advokat/pencari keadilan, posbakum dan para penyedia barang/jasa yang sering berhubungan dengan Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang diundang untuk dapat menandatangani pakta integritas kepatuhan akan penerapan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2024.

d. Sosialisasi Kebijakan dan Pedoman SMAP

Sosialisasi dilakukan terhadap para stakeholder yang ditujukan untuk memberi pemahaman dan kesadaran mengenai Anti Penyuapan di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Adapun media yang digunakan yakni melalui pemaparan secara langsung, informasi di *website*, media sosial, media penyiaran/TV dan *email blasting*. Sosialisasi ini dilakukan secara terus menerus dari bulan Mei hingga Agustus 2024

e. Sosialisasi *Whistleblowing System*, Benturan Kepentingan, SPIP dan Pengendalian Gratifikasi

Sosialisasi ini ditujukan lebih banyak untuk aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan pelaksanaan kegiatannya disiapkan oleh Tim Pembangun Integritas SMAP. Selain dalam bentuk pemaparan secara langsung kepada para aparaturnya dan penyebaran informasi di berbagai media elektronik, sosialisasi juga dilakukan dengan media apel pagi, yang dikenal di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai kegiatan "*morning spirit*" dengan tema khusus terkait WBS, Benturan Kepentingan, SPIP dan Gratifikasi yang disampaikan oleh aparaturnya secara bergilir. Untuk mengisi kegiatan sosialisasi, pada tanggal 24 Juni 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga turut menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia untuk memberikan materi terkait tema-tema tersebut kepada aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Sosialisasi terus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan selama bulan Mei sampai dengan Juni 2024. Untuk memastikan pemahaman tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan kegiatan "Ujian Akhir SMAP (UAS)" yang dikemas dalam bentuk *fun games*. Seperti halnya dalam proses kegiatan belajar-mengajar, tingkat pemahaman aparaturnya juga perlu dinilai untuk dapat memberikan gambaran sejauh mana tingkat pemahaman para aparaturnya dalam memahami materi-materi sosialisasi tersebut.

f. Internal Audit

Internal Audit atau pemeriksaan atas penerapan SMAP dilakukan oleh Internal Auditor atau Tim Assessor, yang seluruhnya merupakan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Proses Internal Audit dilaksanakan selama 4 (empat) hari, dari tanggal 6 Juni 2024 sampai 9 Juni 2024. Tim Internal Auditor bekerja untuk memastikan seluruh persyaratan dalam penerapan SMAP terpenuhi dengan melakukan peninjauan SOP, hasil pengawasan dan tindak lanjut terhadap penyusunan atau dugaan penyusunan (jika ada). Kekurangan, penyimpangan atau temuan yang didapat Tim Internal Auditor selanjutnya diberikan rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti.

g. Tinjauan FKAP

Rapat Tinjauan FKAP dilaksanakan untuk menilai efektivitas SMAP dalam menindaklanjuti risiko penyuapan yang dihadapi dan memastikan SMAP telah diterapkan secara efektif termasuk tindak lanjut dari hasil pemeriksaan dan audit yang telah dilaksanakan oleh Tim Assesor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Rapat Tinjauan FKAP yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2024 dipimpin oleh Ketua Tim FKAP dan hasilnya dilaporkan ke Manajemen Puncak, yakni Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

h. Tinjauan Manajemen

Tinjauan Manajemen dipimpin langsung oleh Manajemen Puncak yang pelaksanaannya dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali atau setiap semester. Di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Rapat Tinjauan Manajemen dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2024. Rapat Tinjauan Manajemen ini ditujukan untuk memastikan keberlanjutan, kesesuaian, kecukupan dan keefektifan implementasi SMAP.

i. Evaluasi Bawas MA RI

Kegiatan evaluasi pembangunan SMAP dilakukan oleh Tim Evaluator yang berasal dari Bawas MA RI, kegiatan evaluasi terdiri dari Tinjauan Dokumen, Uji Petik, Wawancara dan Pengamatan (*Mystery Shopping*). Evaluasi ini dilakukan secara bertahap dari bulan September 2024 sampai dengan pengumuman hasil akhir di bulan Desember 2024.

j. Penerimaan Sertifikat SMAP

Berdasarkan hasil evaluasi Bawas MA RI, pada tanggal 21 Desember 2024, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ditetapkan "Lulus" dengan nilai 93,77 dan predikat "A".

d.9.2 Deskripsi tentang risiko penyuapan sebelum diterapkan SMAP dan sesudah diterapkan SMAP

Sebagai Pengadilan yang telah menerapkan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tidak menjadikan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terbebas dari risiko penyuapan. Risiko itu ada dan tetap menjadi momok yang mampu mencoreng citra lembaga peradilan. Pada hakekatnya, tindakan penyuapan atau gratifikasi dilakukan oleh dua belah pihak, ketika aparaturnya tegas menolak/tidak menerima maka tidak ada penyuapan atau gratifikasi, demikian juga sebaliknya. Namun, yang terjadi adalah ketika aparaturnya sudah berusaha menjaga integritasnya, godaan untuk melakukan penyimpangan akan tetap

dan terus ada, karenanya risiko penyyuapan atau penyimpangan dipengaruhi oleh 3 (tiga) hal, yaitu *opportunity*, *pressure* dan *rationalization*.

Contoh sederhana sebelum diterapkan SMAP, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki risiko berupa upaya gratifikasi dengan pembayaran uang melebihi aturan yang sudah ditentukan. Hal tersebut beberapa kali terjadi dan setelah dilakukan analisis risiko memiliki tingkat kemungkinan 50%. Contoh lainnya, yakni pemberian tip parkir yang masih marak terjadi dengan nominal yang hanya beberapa ribu rupiah saja. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kejadian-kejadian tersebut itu sepenuhnya akibat dari keinginan petugas pelayanan? Apakah mereka tidak mempunyai integritas? Jawabnya tidak selalu demikian dan oleh karenanya dilakukan identifikasi risiko di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Kemudian, apakah risiko besar lainnya, seperti “jual beli putusan” ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebelum diterapkannya SMAP? Ya tentu saja! karena itu termasuk risiko melekat (*inherent risk*) yang ada disetiap pengadilan. Selain dari pada itu, banyak risiko-risiko lainnya yang mampu menggerogoti integritas aparaturnya Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Adanya implementasi SMAP dianggap mampu mendukung dan melengkapi penerapan Zona Integritas. Implementasi SMAP yang salah satu tahapannya harus memetakan dan memitigasi risiko penyyuapan diharapkan mampu menutup jalur yang mungkin dapat dimasuki oleh oknum-oknum untuk melakukan tindakan penyyuapan, gratifikasi dan penyimpangan lainnya. Sesudah diterapkan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, risiko-risiko penyyuapan, baik yang memiliki nilai risiko rendah hingga tinggi telah sepenuhnya dilakukan identifikasi, analisis, evaluasi dan penanganan serta dimonitor, sehingga risiko yang tersisa (*residual risk*) seluruhnya telah bernilai di bawah moderat. Sebagai contoh, saat ini kecil kemungkinan para pencari keadilan memberikan uang lebih untuk pembayaran biaya layanan, karena telah ada upaya mitigasi dengan penerapan metode pembayaran *cashless* yang telah mampu menghilangkan praktik tersebut.

d.9.3. Deskripsi inovasi-inovasi anti penyyuapan yang digagas PTUN Serang

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang guna mendukung penerapan SMAP mencoba menerapkan pembayaran non tunai atau *cashless* terhadap semua jenis pembayaran biaya produk pelayanan. Saat ini sudah umum digunakan pembayaran non tunai di Mahkamah Agung, misalnya penggunaan metode pembayaran *Virtual Account* untuk pembayaran panjar biaya perkara. Namun, di luar dari pembayaran panjar biaya perkara, untuk pembayaran

layanan pengadilan lainnya tidak diwajibkan menggunakan pembayaran secara non tunai.

Berangkat dari adanya risiko penerimaan uang yang tidak seharusnya dari proses pembayaran biaya produk pengadilan yang dilakukan secara tunai, misalnya risiko pemberian tip, pungutan liar, dan gratifikasi, maka per tanggal 29 Juni 2024, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerbitkan instruksi untuk mewajibkan seluruh pembayaran biaya produk pengadilan dilakukan secara *cashless*. Pembayaran dapat dilakukan melalui *Virtual Account*, mesin *Electronic Data Capture* (EDC), maupun *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS).

Pembayaran yang dilakukan secara *cashless* diterapkan terhadap semua produk pengadilan, mulai dari panjar perkara gugatan/permohonan dan upaya hukum, biaya sidang pemeriksaan setempat, biaya perkara eksekusi, biaya pengambilan salinan putusan/penetapan, biaya pendaftaran surat kuasa, biaya surat keterangan bebas perkara dan biaya produk lainnya. Dengan metode ini, para pihak atau masyarakat diharapkan akan merasa nyaman ketika akan membayar produk layanannya, karena risiko permintaan tambahan biaya yang tidak sesuai atau pungutan liar dapat dihindarkan. Aparatur Pengadilan pun akan terjaga dari pemberian biaya atau uang lebih, yang sering dilakukan oleh para pihak, sebagai bentuk imbalan atas jasa layanan yang diberikan. Hal sederhana yang mampu memberikan dampak besar terhadap citra pelayanan publik melalui pembayaran, yang tidak hanya lebih mudah dan modern, tetapi lebih aman.

d.9.4. Deskripsi strategi utama PTUN Serang dalam memitigasi risiko anti penyuapan

Semudah dan sesederhana apapun pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan pasti memiliki risiko, khususnya yang terkait dengan risiko tindakan penyuapan. Oleh karenanya, Manajemen risiko penyuapan menjadi salah satu kegiatan penting dalam upaya penerapan SMAP di pengadilan. Terdapat 52 (lima puluh dua) kejadian risiko yang teridentifikasi dalam upaya penerapan SMAP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, mulai dari risiko upaya penyuapan dari pihak berperkara untuk meloloskan berkas pendaftaran perkara hingga upaya penyuapan dari pihak calon penyedia barang/jasa untuk dapat melaksanakan kegiatan pengadaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Seluruh risiko yang teridentifikasi merupakan risiko yang tidak dapat dihindari, maupun tidak dapat dilakukan *risk transfer* atau dipindahkan kepada pihak lain. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kemudian melakukan tindakan *risk reduction* atau mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Strategi Pengadilan Tata Usaha

Negara Serang untuk mengurangi atau memitigasi risiko penyuapan dapat diuraikan sebagai berikut:

- Peningkatan Fungsi Pengawasan Melekat (Waskat)
Risiko penyuapan banyak terjadi akibat lemahnya pengawasan atau pengendalian internal, oleh karenanya, selain menunjuk Hakim Pengawas Bidang pada setiap unit/bagian dan pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya, setiap kegiatan atau tugas di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga ditunjuk Hakim Pengawasnya. Sebagai contoh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjuk Hakim Pengawas SIPP dan Hakim Pengawas PTSP. Lebih dari itu, secara fisik, pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang juga melakukan pengawasan melalui CCTV yang telah terpasang lebih dari 24 (dua puluh empat) unit CCTV di titik-titik krusial. CCTV ini yang tidak hanya dapat dipantau melalui monitor TV di ruang pimpinan, tetapi juga dapat dipantau melalui *smartphone* pimpinan ketika sedang berada di luar kantor atau luar dinas.
- Sosialisasi kanal pengaduan secara massif
Pengumuman kanal pengaduan melalui pengeras suara setiap 2 (dua) jam di lingkungan kantor, penayangan atau *publishing* artikel kanal pengaduan di *website* dan penempatan konten atau *posting* kanal pengaduan ke media sosial serta *email blast* atau pengiriman pesan yang berisi kanal pengaduan secara massal kepada semua pengguna layanan pengadilan sedikit banyak telah mempengaruhi rasa takut dan kehati-hatian para aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk tetap menjaga prilakunya supaya tidak tersandung laporan pengaduan. Masyarakat dan para pencari keadilan di ‘bombardir’ dengan informasi kemudahan cara mengadukan pemberian layanan yang tidak sesuai/menyimpang. Tidak sedikit memang media pengaduan dijadikan alat atau disalahgunakan oleh pihak berkepentingan untuk menakut-nakuti atau ‘merecoki’ pengadilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun justru bayang-bayang tersebutlah yang menjadikan aparatur dapat bekerja secara cermat, hati-hati dan tentunya berkeadilan. Bayang-bayang tersebut akan selalu menjadi pengingat untuk tetap menjaga integritas para aparatur di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

d.9.5. Deskripsi proyeksi anti Penyuapan instansi PTUN Serang di masa depan

Setelah mendapatkan sertifikasi SMAP tidak mengartikan bahwa kinerja dan layanan akan selalu baik dan akan terbebas dari upaya penyuapan. Ibarat

mengendarai sepeda, untuk membuat sepeda tetap berjalan dan mencapai tujuannya, roda sepeda perlu dikayuh, tidak peduli cepat atau lambat tetapi harus tetap dikayuh, agar tidak berhenti dan terjatuh. Demikian juga dengan upaya peningkatan layanan dan kinerja yang bebas dari penyuapan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, harus tetap dilaksanakan dan terus ditingkatkan. Di masa yang akan datang, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang memiliki 2 (dua) fokus utama dalam upaya menjaga integritas agar selalu bebas dari penyuapan, yakni dari segi teknis dan non teknis. Teknis diartikan bahwa sasaran peningkatan tertuju pada percepatan pelayanan dari Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, sedangkan non teknis lebih menyoar pada optimalisasi perubahan "*Mind set*" dan "*Culture set*" dari Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Upaya peningkatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Digitalisasi dan Percepatan Layanan

Selain mendukung langkah Mahkamah Agung RI dalam upaya transformasi layanan dari konvensional ke layanan digital atau elektronik, digitalisasi layanan ternyata juga mampu untuk meminimalisir tingkat risiko penyuapan di pengadilan. Digitalisasi layanan bisa mempercepat dan mempermudah pemberian layanan publik. Tidak dapat dipungkiri bahwa upaya penyuapan atau pun penyimpangan lainnya banyak disebabkan oleh birokrasi yang rumit dan lambat. Semakin cepat dan mudahnya penerimaan layanan akan membantu mempersempit ruang gerak dan celah-celah penyuapan. Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat diharapkan akan semakin meniadakan penyimpangan tersebut. Oleh karenanya, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kedepan akan terus berupaya melanjutkan proses percepatan dan perubahan layanan dengan mendigitalisasinya.

Sebagai contoh kecil dari upaya yang akan dilakukan yakni, dengan masih adanya pelayanan di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilakukan secara konvensional, seperti layanan pemberian surat keterangan dan informasi, maka secara bertahap layanan di PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan dialihbentukkan menjadi digital. Lebih lanjut, dalam proses pemeriksaan perkara, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan memulainya dengan percepatan proses pemeriksaan persiapan melalui penerapan konsep *paperless*. *Paperless* dalam hal ini diartikan sebagai upaya pengurangan penggunaan kertas dalam proses cetak-mencetak dokumen persidangan. Di peradilan tata usaha negara dikenal adanya proses pemeriksaan persiapan, yakni proses

perbaikan formal gugatan sebagai bagian dari rangkaian proses penyelesaian perkara sebelum masuk ke persidangan. Proses ini umumnya menghabiskan waktu sampai dengan 30 (tiga puluh) hari. Hal ini sering terjadi karena setiap saran perbaikan gugatan dari Majelis Hakim akan diberikan kesempatan 1 (satu) minggu untuk perbaikan. Melalui upaya *paperless*, para pihak, khususnya Penggugat, dapat langsung memperbaiki gugatannya pada saat pemeriksaan persiapan berlangsung dengan didukung penyediaan perangkat elektronik untuk para pihak di dalam ruang pemeriksaan persiapan, seperti PC dan Printer. Upaya ini akan mempercepat dan mempermudah proses pemeriksaan persiapan sehingga waktu penyelesaian perkara dapat dipersingkat.

- *A Change in Mind Set and Culture Set*

Menumbuhkan kesadaran, menjaga motivasi, membangun dan meningkatkan *emotional* dan *spiritual intelligence* dalam proses menjaga integritas bukanlah suatu hal yang mudah! Untuk itu, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang akan terus berupaya menjaga *mind set* atau pola pikir dan *culture set* atau budaya kerja para aparaturnya untuk tetap setia dan teguh pada pendirian anti penyusutan. Mengatur ulang atau *reset* pemahaman para aparatur bahwa semua yang dikerjakan oleh masing-masing pasti akan dimintai pertanggungjawabannya. Adapun contoh upaya yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Serang kedepan yakni dengan akan mengagendakan kegiatan Siraman Rohani dan Motivasi secara rutin. Hal tersebut diharapkan dapat menjadi jembatan untuk memadukan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual para aparatur sehingga upaya penyimpangan/penerimaan suap dapat terus diredam.

d.9.6. Deskripsi tips dan trik PTUN Serang dalam meraih SMAP

- Implementasi POAC: *Planning-Organizing-Actuating-Controlling*

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan, perencanaan yang matang merupakan awal dari kesuksesan. Oleh karena itu, pada saat awal menerapkan SMAP, Pimpinan dan Tim perlu merumuskan perencanaan secara seksama. Pembagian dan penugasan kelompok atau individu ditetapkan oleh pimpinan untuk menyelesaikan suatu tugas. Dalam proses pelaksanaan kegiatan, pimpinan harus memastikan bahwa pekerjaan telah sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Sebagai contoh, Tim SMAP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang membuat matriks rencana kerja, yang di dalamnya memuat semua kegiatan SMAP yang akan

dikerjakan dengan disertai para penanggungjawab dan waktu pelaksanaannya. Pimpinan ataupun Ketua FKAP SMAP secara rutin, minimal 1 bulan sekali, harus melakukan pengecekan atas *progress* pengerjaan yang telah dilakukan dan segera mencari solusi apabila ditemukan kendala yang menjadi penghambat pekerjaan.

- Terapkan konsep "*the right men in the right place*"
Pimpinan menganalisa penempatan SDM-nya. Penempatan aparatur yang sesuai dengan minat dan potensi berdampak nyata terhadap peningkatan kinerja dan kualitas kerja sehingga apa yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai. Sebagai contoh, dalam penyusunan Tim SMAP, pimpinan harus benar-benar cermat dalam menyusun tim. Dibantu unit terkait, misalnya Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana atau Tim Baperjakat, pimpinan dapat memetakan dan memutuskan susunan Tim SMAP. Pilihlah Hakim atau pegawai yang benar-benar diyakini memiliki *skill* dan pengetahuan serta kemauan untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Tidak perlu terikat untuk memilih susunan tim berdasarkan pada pangkat, jabatan dan senioritas. Meskipun benar bahwa dalam suatu susunan tim pasti ada jabatan yang harus dipegang oleh pejabat tertentu, namun ketetapan tersebut dapat ditanggulangi dengan menambahkan tim/anggota yang mumpuni untuk mendukungnya.
- Atasi *Resistance* dengan terapkan konsep *Know Your Employee*
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di akhir tahun 2022 mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), suatu predikat puncak dalam reformasi birokrasi penyelenggaraan pemerintahan yang semestinya memberikan label tersendiri kepada para aparatur bahwa "Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah aparatur yang berintegritas dan berorientasi kepada pelayanan yang prima". Meskipun demikian, apakah seluruh aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan serta merta mau dan antusias untuk menerapkan SMAP? Nyatanya resistensi terhadap perubahan, dalam hal ini kegiatan SMAP, tetap ada! dan bagaimana langkah untuk menanganinya?
Pimpinan Pengadilan harus banyak terlibat dalam setiap kegiatan di kantor dan banyak berkomunikasi dengan para aparaturnya.

Hal tersebut tidak lain bertujuan untuk mengenal para aparaturnya dengan lebih baik dan tidak ada kesan acuh atau masa bodoh. Konsep KYE atau *know your employee* yang umumnya banyak digunakan di perusahaan atau perbankan untuk mendeteksi dan mengatasi *fraud* atau perbuatan melawan hukum untuk memperoleh keuntungan pribadi, dapat juga diterapkan di pengadilan dalam upaya penerapan SMAP. Penerapan konsep KYE dapat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan yang bisa dilakukan, misalnya dengan rapat atau diskusi ringan antara Ketua atau Wakil Ketua dengan Para PPNPN Petugas Kemanan dan Kebersihan (yang umumnya dilakukan oleh Kasubag. Umum dan Keuangan atau Sekretaris). Selain itu, kegiatan olah raga bersama juga dapat dilakukan untuk mempererat hubungan emosional antar aparatur.

Dengan mengenal para aparaturnya, pimpinan selanjutnya dapat membuat strategi yang cocok ketika mendapati resistensi. Banyak teknik yang bisa digunakan oleh pimpinan dalam menghadapi aparatur yang resisten, apakah dengan komunikasi, partisipasi, ataupun paksaan (jika diperlukan). Pimpinan tinggal memilih teknik mana yang lebih sesuai diterapkan setelah mengetahui *background* atau latar belakang para aparaturnya tersebut.



Gambar: 5.28. Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP)
Tahap Evaluasi Tahun 2024

E. Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik Pendukung Tugas dan Fungsi serta bagi Penyandang Disabilitas

Kaum disabilitas merupakan bagian dari anggota masyarakat yang memiliki hak sama dengan anggota masyarakat lainnya (dikutip dari Jurnal ACINTYA Vol 9, No. 1 Penulis Putri Sekar Hapasari, 2017). Penyandang disabilitas terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas penglihatan, penyandang disabilitas pendengaran, penyandang disabilitas mental dan penyandang disabilitas kronis. Para penyandang disabilitas kerap kali terisolir secara sosial dan menghadapi diskriminasi atau perlakuan dalam akses atas kesehatan dan layanan lainnya, seperti sekolah, pekerjaan termasuk fasilitas dan sarana prasarana. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 2002 tentang Pembangunan Gedung (2002) mengatur secara jelas bahwa fasilitas harus aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan. Dalam Pasal 2 PP ini, lembaga penegak hukum wajib menyediakan akomodasi yang layak. Lembaga penegak hukum yang diwajibkan adalah Polri, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang merupakan garda terdepan dalam menerima, memproses dan memutus perkara tata usaha negara turut serta mendukung program pemerintah dalam menyediakan akomodasi berupa prasarana dan sarana yang layak bagi pencari keadilan penyandang disabilitas disesuaikan dengan anggaran yang telah dialokasikan oleh Mahkamah Agung RI.

Sebagai *pilot project* pembangunan sarana dan prasarana disabilitas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah membangun beberapa prasarana dan sarana bagi pencari keadilan berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas dengan mempedomani Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 356/DJMT/KEP/12/2022 tahun 2022 tentang Pedoman Layanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Adapun prasarana dan sarana penyanggah disabilitas yang dimiliki Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 5.29. Toilet Khusus Penyandang Disabilitas



Gambar 5.30. *Tactile Stainless* Pemandu bagi Penyandang Disabilitas



Gambar 5.31. Ubin Pemandu (*guiding block*) dan *handraill ramp* Penyandang Disabilitas



Gambar 5.32 Tanda Parkir Bagi Penyandang Disabilitas



Gambar 5.33 Tombol Panik (*panic button*) pada Toilet Penyandang Disabilitas



Gambar 5.34. Tempat Penyimpanan Peralatan Disabilitas (*Disability Toolkit*)



Gambar 5.35 Kursi/Ruang Tunggu Penyandang Disabilitas



Gambar 5.36 Rambu/Tanda Prioritas bagi Penyandang Disabilitas



Gambar 5.37 Ruang Kesehatan dan Ruang Laktasi



Gambar 5.38 Lapangan Permanen dan Musholla sebagai sarana pendukung Tusi Kantor PTUN Serang



Gambar 5.39 Ruang Media Center sebagai sarana untuk rapat internal maupun dengan eksternal



Gambar 5.40 Lemari/box bawah tangga untuk tempat penyimpanan peralatan kebersihan/Janitor



Gambar 5.41 Kanopi pada teras/lobby belakang kantor PTUN Serang Untuk mengurangi dampak tampias air hujan yang sering menggenang



Gambar 5.42 Ruang tunggu *outdoor* sebagai sarana mengakomodir kenyamanan pengunjung sidang tatkala ruang tunggu di dalam ruangan gedung telah terisi penuh dan bilik ATM untuk transaksi keuangan pegawai PTUN Serang maupun masyarakat sekitar.



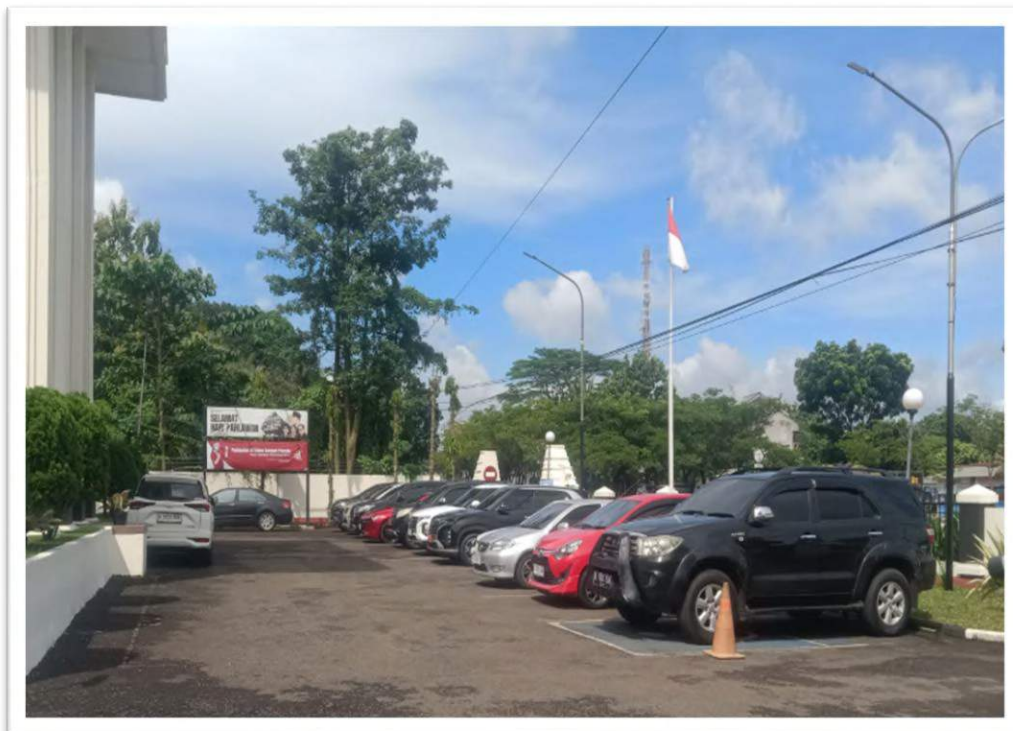
Gambar 5.43 Penyediaan genset dengan kapasitas mesin generator yang memadai untuk mengcover daya listrik seluruh gedung saat terjadi pemadaman listrik dari PLN .



Gambar 5.44 Area Parkir Kendaraan Roda Empat Pimpinan dan Hakim



Gambar 5.45 Area Parkir Kendaraan Roda Dua Pegawai Kantor PTUN Serang



Gambar 5.46 Area Parkir Kendaraan Pengunjung Sidang/Tamu

F. Penguatan Jasmani dan Rohani

Produktifitas kinerja aparatur dalam menerapkan layanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan perlu ditopang dengan mental spiritual yang kuat, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Serang demi menjaga produktifitas kinerja aparatur turut serta aktif melakukan aktifitas yang berkaitan dengan penguatan jasmani dan rohani.



Gambar 5.47 Kegiatan HUT Peratun ke-33 sambil dikemas dengan *Employee Gathering* Untuk Lebih Mempererat Tali Silaturahmi di Lingkungan Keluarga Besar Pengadilan Tata Usaha Negara Serang



Gambar 5.48 Untuk Menjaga Kebugaran Tubuh Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Mengadakan Senam/Jalan Santai di Sela-sela Padatnya Rutinitas



Gambar 5.49 Penguatan Mental Spiritual Aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Selain Kegiatan Ibadah Sholat Berjamaah Juga Memiliki Program *One Day One Juz* yang Dilaksanakan di Musholla Kantor Ba'da Sholat Dzuhur Berjamaah



Gambar 5.50 Untuk Meningkatkan Pengetahuan Aparatur Dalam Bidang Keagamaan (Islam) DKM Asshiddiqiin Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Mengadakan Kajian Rutin Seputar Ilmu Tajwid, Makharijul Huruf, Ilmu Fiqih Dasar dan Pengetahuan Dasar Lainnya.

BAB VI

PENGAWASAN

A. Internal

1. Pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku baik berupa peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung, dan sebagainya antara lain :
 - a. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/II/1994 dan Juklak tentang Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan.
 - b. Surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 1 Agustus 1994 Nomor : MA/Kumdil/207/VIII/K/1994.
 - c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal 11 Mei 1993 tentang Pembinaan Personil dan Kepemimpinan Pengadilan.
 - d. Surat Ketua MARI Nomor: MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 tanggal 1 Agustus 1994 yang menginstruksikan penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Banding) dan penunjukan Hakim Pengawas Bidang (di Pengadilan Tingkat Pertama).
 - e. Keputusan Ketua MARI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan tanggal 24 Agustus 2006.
 - f. Keputusan Sekretaris MARI Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
 - g. Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : W2-TUN7/1234/PS.00/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menunjuk Wakil Ketua sebagai koordinator Hakim-Hakim Pengawas Bidang.
3. Penunjukan Hakim Pengawas bagi Sub Kepaniteraan Perkara, Sub Kepaniteraan Hukum, Sub Bagian Umum dan Keuangan, Sub Bagian

- Kepegawaian dan Ortala, serta Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan,
4. Pengawasan secara berkala berupa permintaan laporan bulanan ataupun triwulan kepada masing-masing Sub Bagian oleh Hakim Pengawas Bidang disertai tindak lanjut hasil pengawasan.
 5. Pengawasan pokok sesuai ketentuan yang ada terhadap bidang masing-masing (Waskat oleh pejabat yang bersangkutan telah dijalankan dan lebih ditingkatkan) yaitu oleh Panitera, Sekretaris, Panitera Muda Perkara, Panitera Muda Hukum, Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Organisasi Tata Laksana, Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Tabel 6.1. Daftar Nama Hakim Pengawas Bidang Tahun 2024

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	BIDANG PENGAWASAN
1.	RUT ENDANG LESTARI, S.H. NIP. 197609302001122002	Wakil Ketua / Hakim Madya Utama	Koordinator Pengawas Bidang
2.	JULIAH SARAGIH, S.H., M.H. NIP. 197011031996032001	Hakim	Sekretaris Pengawas Bidang
3.	1. EKA PUTRANTI, S.H., M.H. NIP. 198002222003122002 2. ALI ANWAR, S.H., M.H. NIP. 197904052007041001 3. DESSY ANGGRAENI, S.H. NIP. 198412082011012012	Hakim	Pengawas Bidang Kepaniteraan Perkara
4.	1. Dr. AYI SOLEHUDIN, S.H., M.H. NIP. 197811042007041001 2. SAHIBUR RASID, S.H., M.H. NIP. 197907152008051002 3. PUTRI SUKMIANI, S.H. NIP. 198612202011012019	Hakim	Pengawas Bidang Kepaniteraan Hukum
5.	1. TIAR MAHARDI, S.H., M.H. NIP. 198408212007041001 2. RIKI YUDIANDI, S.H., M.H. NIP. 198505062009041004	Hakim	Pengawas Bidang Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
6.	1. Dr. UMAR DANI, S.H., M.H. NIP. 197904292005021002 2. FATMAWATY, S.H., M.H. NIP. 198502252008052001	Hakim	Pengawas Bidang Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
7.	1. BERDYAN SHONATA, S.H. NIP. 198009162009121004 2. MIFTAH SAAD CANIAGO, S.H., M.H. NIP. 198807032011011004	Hakim	Pengawas Bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan (Administrasi Keuangan)
8.	1. LISTYORANI IMAWATI, S.H., M.H. NIP. 198006162006042003 2. TAMADO DHARMAWAN, S.H., M.H. NIP. NIP. 198208262008051001 3. DAFRIAN, S.H. NIP. 198104072008051001	Hakim	Pengawas Bidang Sub Bagian Umum dan Keuangan (Administrasi Umum)

B. Evaluasi

Dalam setiap lembaga pemerintah yang transparan maka harus selalu diadakan evaluasi secara internal, baik di bagian kepaniteraan maupun kesekretariatan. Pelaksanaan tugas administrasi umum secara garis besar sudah berjalan baik dan tertib meskipun masih terdapat kekurangan.

Bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yakni melalui penyebaran kuesioner elektronik untuk survey kepuasan pengguna layanan dilaksanakan per triwulan, serta rapat-rapat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan rutin setiap bulan antara lain Monev Disiplin Pegawai dan Hakim, per triwulan antara lain Monev PPID/Monev terhadap layanan publik, Monev Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Monev Posbakum, Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan per Semester adalah Monev SOP dan Monev Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi, Dilaksanakan per Tahun antara lain Monev SPIP, Monev Manajemen Risiko, Monev Benturan Kepentingan dan Monev Gratifikasi.

BAB VII

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman dan kebijakan maupun program kerja yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun tugas administrasi perkara dan umum di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sudah berjalan dengan baik dan tertib namun secara rutin pembinaan dan pengawasan tetap dilaksanakan untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan.

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 sebagaimana disampaikan di depan dapat memberikan gambaran secara umum tentang keadaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, antara lain:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan;
2. Percepatan penyelesaian perkara telah dilaksanakan secara optimal meskipun masih terdapat beberapa kendala teknis;
3. Pembinaan dan pengawasan internal telah ditunjuk dan di SK-kan Hakim Pengawas Bidang serta telah dijalankan dengan baik dan terus menerus dikembangkan sehingga lebih efektif dan obyektif;
4. Pelaksanaan anggaran dan administrasinya telah dilaksanakan dengan baik dan tertib sesuai dengan besarnya pagu anggaran yang ditetapkan dalam DIPA satuan kerja dan dilakukan evaluasi secara berkala sehingga diharapkan prosentase realisasi setiap tahun optimal;
5. Kebutuhan akan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan serta menunjang kompetensi sumber daya manusia bagi hakim dan pegawai masih sangat diperlukan. Hal ini untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan bagi masyarakat dimana diperlukan tenaga kerja yang profesional;
6. Prestasi yang telah dicapai Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam hal memberikan pelayanan prima dibuktikan dengan meraih Sertifikat

- Akreditasi Penjaminan Mutu dengan Predikat A “Excelent” dua kali berturut-turut;
7. Meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pembangunan Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
 8. Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik telah diupayakan secara baik didukung dengan inovasi-inovasi pelayanan publik yang telah dikembangkan dan diterapkan sehingga atas hal tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dianugerahi sebagai badan publik informatif oleh Komisi Informasi Provinsi Banten.
 9. Berhasil meraih sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyusapan (SMAP) tahap Evaluasi Akhir 2024.

B. REKOMENDASI

1. Perlu adanya penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain: Ruang Sidang, Ruang Rapat, Ruang Hakim, Ruang Panitera Pengganti, Ruang Arsip Perkara maupun Kesekretariatan untuk Kendaraan Dinas, Meubelair, Fasilitas Perkantoran serta Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum memiliki Aula/Ruang Serbaguna yang dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang bersifat seremonial, karena selama ini masih memanfaatkan ruang sidang jika disaat yang bersamaan ada jadwal sidang maka pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terganggu.
3. Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum memiliki Rumah Dinas, hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi Satker ketika pergantian pimpinan yang seyogyanya pimpinan yang baru hanya cukup membawa koper saja namun hal yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pimpinan yang baru akan direpotkan dengan mencari tempat tinggal sewa untuk ditempati sebagai rumah dinas.

4. Perlu tambahan anggaran untuk pembangunan pagar dan penataan area parkir tamu/pengunjung oleh karena jika pelebaran jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dirampungkan maka area parkir untuk tamu/pengunjung akan tergusur, dan lahan parkir akan dialihkan ke tanah sebelah kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai pengganti yang telah disepakati atas lahan yang tergusur untuk pelebaran jalan Provinsi Banten.
5. Perlu penambahan tenaga pegawai untuk pekerjaan yang memerlukan teknis tertentu antara lain: teknisi jaringan, arsiparis, pustakawan, analis perencanaan, analis pelaporan, pranata sarana dan prasarana, serta pranata keuangan.

LAMPIRAN



**KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

**KEPUTUSAN KETUA
NOMOR 1758/KPTUN.W2-TUN3/OT1.6/XII/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

- Menimbang : a. Bahwa, dalam rangka penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- b. Bahwa, nama-nama yang ditunjuk tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa, sehubungan dengan huruf (a) dan (b) di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (prosedur laporan pelaksanaan kegiatan);
5. Peraturan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG;
- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagaimana dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
- KEDUA : Memerintahkan kepada Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan serta menyusun menjadi laporan dengan penuh tanggung jawab;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN:** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan tanggung jawab.

Ditetapkan di Serang
Pada Tanggal 20 Desember 2024
KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



AGUS BUDI SUSILO

LAMPIRAN
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor 1758/KPTUN.W2-TUN3/OT1.6/XII/2024
Tanggal 20 Desember 2024

**DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
		DINAS	TIM
1.	SAHIBUR RASID, S.H., M.H. NIP. 197907152008051002	Hakim	Ketua
2.	MASURI, S.E. NIP.198008082009121002	Kasubbag PTIP	Sekretaris
3.	NURHASANAH, S.H. NIP. 196703081987032001	Sekretaris	Anggota
4.	DHONNI ADHITA SAPUTRA, S.H. NIP. 197310122000031003	Panitera	Anggota
5.	ENI SUKMAWATI SITI MARDIYAH, S.H. NIP. 197005211995032002	Panmud Hukum	Anggota
6.	DARMAWIYADI, S.H. NIP. 196804141993031005	Panmud Perkara	Anggota
7.	SUFI ARYANI, S.E. NIP. 198709252009122004	Ka. Sub.Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Anggota
8.	TUTI ALAWIYAH, S.E., M.H. NIP. 198408102009122004	Ka. Sub Bag Umum dan Keuangan	Anggota
9.	RANDY SETIA PUTRA, S.Kom. NIP. 199304192020121008	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
10.	FITRI INDRIATI NOFITA, A.Md.Kom. NIP. 199411062020122011	Klerek – Pengolah Data dan Informasi	Anggota
11.	LUQMAN NUL HAQIM, S. Kom.	PPNPN	Anggota

KETUA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG



AGUS BUDI SUSILO

**NOTULEN RAPAT
TIM MONEV DAN PENYUSUNAN SOP
PTUN SERANG**

- Hari / Tanggal : Kamis, 14 November 2024
Waktu : Pukul 10.00 WIB sampai 10.30 WIB
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Agenda : Menindaklanjuti Surat Dirjen Badilmiltun tanggal 12 November 2024
Hadir : 1. Ketua Tim Monev dan Penyusunan SOP (Eka Putranti, S.H., M.H.)
2. Panitera Muda Perkara (Darmawiyadi, S.H.)
3. Panitera Muda Hukum (Eni Sukmawati S.M, S.H.)
4. Panitera Pengganti (Elvina R.T, S.H., M.H.)
5. Panitera Pengganti (Wirdayati, A.Md.)
6. Panitera Pengganti (Imam Wardoyo, SH.)
7. Juru Sita Pengganti (Jimmy Fernando D.S, S.H., M.H.)
8. CPNS (Helvan Subia Effendi, S.H.)

Rapat Tim Monev dan Penyusunan SOP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang dilaksanakan berdasarkan Surat Undangan Nomor 1490/KPTUN.W2-TUN3/OT.01.2/XI/2024 tertanggal 14 November 2024 di Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari dan tanggal tersebut diatas dimulai pada pukul 10.00 WIB adalah dalam rangka menindaklanjuti Surat Dirjen Badilmiltun Nomor 2293/DjMT.3/B/OT1.2/XI/2024 perihal Permintaan Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 12 November 2024.

Hasil rapat Tim Monev dan Penyusunan SOP sebagai berikut:

1. Ketua SOP membuka rapat dengan menyampaikan tujuan diadakan rapat pada hari ini adalah untuk melakukan koordinasi sehubungan dengan adanya Surat Dirjen Badilmiltun Nomor 2293/DjMT.3/B/OT1.2/XI/2024 perihal Permintaan Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP) Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Bahwa sesuai dengan surat tersebut batas akhir pengumpulan jika ada saran dan masukan terkait SOP yang akan di reviu adalah tanggal 27 November 2024.
3. Disampaikan oleh Ketua Tim bahwa rapat yang akan diadakan oleh Tim SOP juga sekaligus untuk melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap SOP PTUN Serang yang telah ada di Kepaniteraan baik Kepaniteraan Perkara maupun Hukum, Panitera Pengganti dan Juru Sita, serta SOP Hakim. Pada rapat ini masing-masing perwakilan hadir, maka masing-masing bagian sesuai dengan tupoksinya untuk mempelajari SOP nya sekaligus melakukan Cross Check terhadap SOP Dirjen dan jika ada saran agar diberi catatan pada SOP tersebut. SOP yang telah diberi catatan untuk di diskusikan agar disampaikan kepada Panitera sebelum diajukan dalam rapat besar Monev SOP, sehingga Panitera pun sudah mengetahui SOP mana saja yang sekiranya diberi saran untuk diubah.
4. Bahwa Ketua Tim telah menetapkan jadwal untuk Reviu sekaligus Monev SOP yaitu pada hari Selasa tanggal 19 November 2024, Kamis tanggal 21 November 2024, jika masih belum selesai akan dilanjutkan pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 dengan harapan tanggal 25 Nov 2024 baik Monev maupun Reviu SOP sudah selsai dilaksanakan dan jika memang ada usulan untuk SOP Dirjen bisa segera ditindaklanjuti dengan mengirimkan lewat link/tautan sebagaimana termuat dalam surat Dirjen.

5. Ketua Tim SOP menyampaikan jika dimungkinkan ketika Monev ataupun Reviu tiap-tiap bagian sesuai dengan SOP nya atasan setiap bagian tersebut dapat hadir sehingga bisa memberi masukan untuk perbaikan.

Rapat selesai pada pukul 10.30 WIB.

Serang, 14 November 2024

Mengetahui,
Ketua Tim Monev dan Penyusunan SOP



Eka Putranti, S.H.M.H.

Notulis



Helvan Subia Effendi, S.H.

DOKUMENTASI





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal A. Yani Kav.58 (Lt. 9 - 10) By Pass Jakarta 10510 PO BOX 1148
Telepon (021) 29079177 (Hunting) Fax (021) 29079208-29079205
<http://www.ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id/>

Jakarta, 12 November 2024

Nomor : 2293/DjMT.3/B/OT1.2/XI/2024
Lampiran: -
Hal : Permintaan Reviu Standar Operasional Prosedur (SOP)
Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Kepada Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
4. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
5. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya.

di -

Tempat

Dalam rangka menyempurnakan Buku Pedoman Kerja Standar Operasional Prosedur (SOP) Tenaga Teknis (Hakim, Panitera, Jurusita Pengganti) dan Administrasi Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Edisi Tahun 2018, telah dilakukan Revisi oleh Tim Kelompok Kerja Penyusunan SOP pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara, dengan hasil revisi SOP sebagai berikut:

Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tingkat Pertama

NO.	NAMA SOP	SEMULA	MENJADI
1.	Bab I Standar Operasional Prosedur (SOP) Hakim	7 SOP	11 SOP
2.	Bab II Standar Operasional Prosedur (SOP) Panitera Pengganti	3 SOP	4 SOP
3.	Bab III Standar Operasional Prosedur (SOP) Jurusita Pengganti	1 SOP	2 SOP
4.	Bab IV Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Perkara	34 SOP	93 SOP
5.	Bab VI Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Hukum	15 SOP	34 SOP
Jumlah		60 SOP	144 SOP



Balai
Sertifikasi
Elektronik

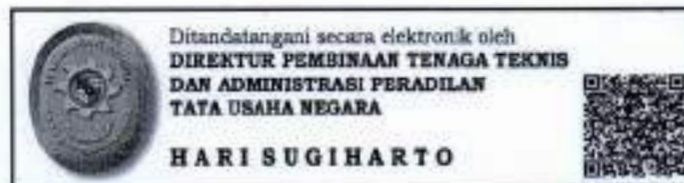
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadilan Tingkat Banding

NAMA SOP	SEMULA	MENJADI
Bab V Standar Operasional Prosedur (SOP) Kepaniteraan Perkara Banding, Kasasi, PK	Belum ada	9 SOP
Jumlah	-	9 SOP

Namun demikian Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara masih memerlukan masukan, saran dan pendapat terhadap revisi SOP tersebut sebelum diberlakukan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun *softcopy* untuk mereviu Buku Pedoman Kerja SOP tersebut dapat diakses melalui Google Drive dengan tautan sebagai berikut: <https://s.djmt.id/WGZs> dan dilakukan paling lambat tanggal 27 November 2024. Informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut dapat menghubungi Sdri. Meylan, S.Sos., M.M. (Kepala Seksi Tata Kelola TUN) melalui nomor HP/WA: 0818954243.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Nomor : 1490 /KPTUN.W2-TUN3/OT.01.2/XI/2024
Serang, 14 November 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Monev SOP
Kepaniteraan pada PTUN Serang

Kepada Yth.
Tim SOP Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Di-
tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengundang Tim SOP Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk hadir dalam acara rapat monev SOP Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang akan dilaksanakan :

Pada hari, tanggal : Kamis, 14 November 2024
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani No.3 Km.5 Serang – Banten.

Demikian atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih

Ketua Tim Monev dan Penyusunan SOP
PTUN Serang,

Eka Putranti



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

**DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
HARI KAMIS, TANGGAL 14 NOVEMBER 2024
PUKUL 10.00 WIB S.D SELESAI**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN/PARAF
1.	Eka P	Hakim	f.
2.	Darmaningih	panutan per	h
3.	Jing F.	JIP	f
4.	Alvin R.T	PP	2
5.	Windaqati	PP	f
6.	Helva M. Effendi	LYNs	Helva
7.	Eri Sulmawati	Pasman Hle	Eri
8.	Imam Wardoyo	PP	f
9.			
10.			
11.			

Serang, 14 November 2024
Ketua Tim Monev dan Penyusunan SOP
PTUN Serang,

Eka Putranti



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Nomor : 1096 /KPTUN.W2-TUN3/OT.01.2/VIII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Koordinasi SOP
Kepaniteraan pada PTUN Serang

Serang, 15 Agustus 2024

Kepada Yth.
Tim SOP Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Di-
tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengundang Tim SOP Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk hadir dalam acara rapat koordinasi SOP Kepaniteraan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang akan dilaksanakan :

Pada hari, tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024
Waktu : 10.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani No.3 Km.5 Serang – Banten.

Demikian atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih

Ketua Tim Monev dan Penyusunan SOP
PTUN Serang,

Eka Putranti



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

**DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KEPANITERAAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
HARI KAMIS, TANGGAL 15 AGUSTUS 2024
PUKUL 10.00 WIB S.D SELESAI**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN/PARAF
1.	Elsa P	Hakim	
2.	DHONNI AV. SH	Panitera	
3.	Eni Sulemawah	Panmud Hkam	
4.	Aarnandiyadi	panmud per	
5.	Sumarni-Estanipar	Pelaksana	
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			

Serang, 15 Agustus 2024
Ketua Tim Monev dan Penyusunan SOP
PTUN Serang,

Eka Putranti



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085
Kota Serang, Banten 42123

www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Hari / Tanggal: Kamis, 15 Agustus 2024

Waktu : 10.00 Wib s.d selesai

Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Agenda : Rapat Koordinasi SOP Kepaniteraan pada PTUN Serang

Pimpinan Rapat : Eka Putranti, S.H., M.H.

Peserta : Terlampir

Pembukaan:

Ibu Eka Putranti, SH., MH. selaku Ketua Tim Penyusunan dan Monev Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan sebagai Pimpinan Rapat pada hari ini membuka rapat dengan ucapan salam kepada seluruh peserta rapat.

Ringkasan:

Adapun yang dibahas dalam rapat ini adalah mengenai perubahan SOP Perkara sebagai berikut:

1. SOP Perkara No. 035

- Mengenai perubahan nama SOP yang semula Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama secara e-Court menjadi Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara Tingkat Pertama secara Transfer Bank.
- Adapun terdapat penambahan catatan dalam SOP 035 yaitu Jika terjadi kendala teknis, yang menyebabkan tidak bisa dilakukannya transfer bank, maka diterapkan SOP 033/PRK.

Dikarenakan agenda rapat sudah selesai, maka rapat di tutup oleh Ibu Eka Putranti, SH., MH. selaku Ketua Tim Penyusunan dan Monev Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan sebagai Pimpinan Rapat dengan mengucapkan salam dan terima kasih kepada seluruh peserta rapat.

Mengetahui,

**Ketua Tim Penyusun dan Monev SOP
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,**

Eka Putranti, SH., MH.

NIP. 19800222 200312 2 002

Notulis,

Sumarni Elprida Sianipar, A.Md.

NIP. 19841110 201903 2 004



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN
MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085
Kota Serang, Banten 42123

www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id





PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jl. Syekh Namani Al Bantani No.3 Km.5 Kel. Banjarsari,
Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang - Banten 42123
Tlp/Fax : (0284) 21-8085

Website: <http://www.ptun-serang.go.id> | Email: informasi@ptun-serang.go.id

Nomor SOP	SOP/035/PRK
Tanggal Pembuatan	05 Februari 2020
Tanggal Revisi	15 Agustus 2024
Tanggal Efektif	15 Agustus 2024
DISAHKAN OLEH	Ketua PTUN Serang Dr. AGUS BUDI SUSILO, S.H., M.H. NIP. 197608102000121001
NAMA SOP	PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA SECARA TRANSFER BANK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan
4. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 48/DjMT/KEP/VII/2012 Tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Administrasi Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara

KETERKAITAN

1. SOP Penerimaan Perkara
2. SOP Pemeriksaan Perkara Gugatan/ Banding/ Kasasi/ Peninjauan Kembali

PERINGATAN / CATATAN

Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka asas peradilan tidak akan tercapai.

KUALIFIKASI PELAKSANA





D-III
SI-Hukum

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Formulir Check List
2. Alat Tulis Kantor (ATK)
3. Buku Ekspedisi

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Arsip Perkara Aktif dan Inaktif Kepaniteraan Perkara

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku		
		Hakim	Panitera	Kasir	Bendahara	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Pemberitahuan sisa panjar perkara dalam catatan persidangan					- Aplikasi e-Court - Jaringan internet - Akun & Password	20 menit	- Berita Acara - Catatan persidangan
2.	Meneruskan informasi sisa panjar perkara ke bendahara					- E-mail - Jaringan internet		- Pemberitahuan
3.	Mentransfer sisa panjar perkara kepada para pihak					- No rekening yang terdaftar di e-Court - Jaringan internet - Kendaraan dinas		- Bukti setor transfer pengembalian sisa perkara
4.	Memverifikasi transfer pengembalian sisa panjar					- E-mail - Jaringan internet		Bukti setor transfer pengembalian sisa perkara

Catatan:

- Transfer Bank sesuai dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani Pihak pada saat persidangan pertama.
- Jika terjadi kendala teknis, yang menyebabkan tidak bisa dilakukannya transfer bank, maka diterapkan SOP 033/PRK.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Nomor : 17/2 /KPTUN.W2-TUN3/OT.01.2/XII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Koordinasi Monev SOP
Kesekretariatan pada PTUN Serang

Serang, 17 Desember 2024

Kepada Yth.
Tim SOP Kesekretariatan
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Di-
tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengundang Tim SOP Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk hadir dalam acara rapat Koordinasi Monev SOP Kesekretariatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang akan dilaksanakan :

Pada hari, tanggal : Selasa, 17 Desember 2024
Waktu : 08.30 WIB - selesai
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani No.3 Km.5 Serang – Banten.

Demikian atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih

Ketua Tim Monev dan Penyusunan SOP
PTUN Serang,

Eka Putranti



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

**DAFTAR HADIR
RAPAT KOORDINASI MONEV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) KESEKRETARIATAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
HARI SELASA, TANGGAL 17 DESEMBER 2024
PUKUL 08.30 WIB S.D SELESAI**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN/PARAF
1.	Eka P	Hakim	
2.	Nurhacarah	Sekretaris	
3.	Makuri	Katib PTIP	
4.	Sufi Anyari	Katib KP	
5.	Perina Nur Anyara	Amb SDM	
6.			
7.			
8.			

Serang, 17 Desember 2024
Ketua Tim Monev dan Penyusunan SOP
PTUN Serang,

Eka Putranti



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5, Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42122
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@prun-serang.go.id

NOTULA

Dasar : Surat Ketua Tim Monev dan Penyusunan SOP
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Nomor: 1712/KPTUN.W2-TUN3/OT.01.2/XII/2024
tanggal 17 Desember 2024

Hari : Selasa

Tanggal : 17 Desember 2024

Pukul : 08.30 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Acara : Koordinasi Monev SOP Kesekretariatan PTUN Serang Tahun 2024

Peserta Rapat : Tim SOP Kesekretariatan PTUN Serang

Jalannya Rapat :

Rapat Koordinasi monitoring dan evaluasi SOP Kesekretariatan Tahun 2024 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dibuka oleh Ibu Eka Putranti, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Monev dan Penyusun SOP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Pimpinan Rapat dengan mengucapkan salam kepada seluruh peserta. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa tujuan rapat ini diadakan adalah untuk melakukan koordinasi monev SOP Kesekretariatan pada PTUN Serang.
- ✓ Bahwa kepada masing-masing bagian agar melakukan self monev atau monev secara mandiri untuk setiap SOP yang ada di bagiannya.
- ✓ Bahwa apabila ada SOP yang perlu dilakukan revisi, agar dibuatkan konsep SOP yang direvisi tersebut beserta dasar perubahannya dan akan dirapatkan pada rapat SOP selanjutnya.
- ✓ Bahwa apabila juga ditemukan SOP yang dinilai sudah tidak relevan dengan keadaan atau pelaksanaan yang telah dilakukan dapat juga diajukan revisi SOP.
- ✓ Bahwa apabila juga diperlukan adanya SOP baru untuk menunjang pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan namun SOP nya belum ada, dapat diajukan pengajuan penambahan SOP.
- ✓ Bahwa hasil dari monev mandiri tersebut akan dirapatkan kembali pada bulan Januari di tanggal 13 Januari 2025 dengan sebelumnya sudah dirapatkan oleh Sekretaris PTUN Serang.
- ✓ Bahwa hasil evaluasi tersebut dapat dilaporkan kepada Sekretaris PTUN Serang pada tanggal 6 s.d. 10 Januari 2025 sebelum diajukan ke rapat bersama SOP.
- ✓ Bahwa evaluasi bersama dengan Ketua Tim Monev dan penyusun SOP akan dilakukan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025.

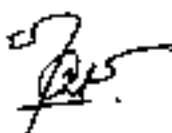
Selanjutnya karena sudah tidak ada yang bertanya dan menanggapi lagi, maka rapat ditutup dengan mengucapkan salam kepada seluruh peserta rapat.

Notulis,



Sufi Aryan

Ketua Tim Tim Monev dan Penyusunan SOP
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang,



Eka Putranti



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5, Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

**DOKUMENTASI RAPAT
KOORDINASI DAN MONEV SOP KESEKRETARIATAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
SERANG, 17 DESEMBER 2024**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

Nomor : 1080/PAN.PTUN.W2-TUN3/ OT.01.2/VIII/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Tim Manajemen Risiko
pada PTUN Serang

Serang, 15 Agustus 2024

Kepada Yth.
Tim Manajemen Risiko
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Di-
tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengundang Tim Manajemen Risiko Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk hadir dalam acara Rapat yang akan dilaksanakan :

Pada hari, tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024
Waktu : 13.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani No.3 Km.5 Serang – Banten.
Agenda : Monev Risk Register Tahun 2024

Demikian atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Tim Manajemen Risiko
Pengadilan Tata Usaha Negara
Serang,

Dhonni Adhita Saputra



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

**DAFTAR HADIR
RAPAT TIM MANAJEMEN RISIKO
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
HARI KAMIS, TANGGAL 15 AGUSTUS 2024**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN/ PARAF
1	Dhoni A.V. Sy	Paritero/ Sekretaris	
2	Din L	PP/Anggota	
3	Nurbani	SEK.	
4	Emi Sulmawati	Panmud HK/ Anggota	
5	Alina R.T	PP	
6	Tuti A	Kasub Umku	
7	Sufi Anyani	Kasub KP	
8			
9			
10			
11			
12			
13			

Serang, 15 Agustus 2024
Sekretaris Tim Manajemen Risiko
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Dhoni Adhita Saputra



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

NOTULA

Dasar : Surat Sekretaris Tim Manajemen Risiko PTUN Serang
Nomor: 1089/PAN.PTUN.W2-TUN3/OT.01.2/VIII/2024
tanggal 15 Agustus 2024

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Agustus 2024

Pukul : 13.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Media Center Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Acara : Monev Risk Register Tahun 2024 Pada PTUN Serang

Peserta Rapat : Tim Manajemen Risiko PTUN Serang

Jalannya Rapat :

Rapat Pembahasan Risk Register Kesekretariatan dibuka oleh Bapak Dhonni Adhita Saputra, S.H. selaku Sekretaris Tim Manajemen Risiko dan Pimpinan Rapat dengan mengucapkan salam kepada seluruh peserta. Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- ✓ Bahwa rapat ini diadakan karena berdasarkan rekomendasi dari Tim Auditor Internal Sistem Manajemen Anti Penyupan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk melakukan monitoring dan evaluasi Register Resiko Tahun 2024 pada PTUN Serang.
- ✓ Bahwa yang mengundang rapat Manajemen Resiko saat ini adalah Sekretaris Manajemen Resiko karena terdapat kekosongan Ketua Tim yang saat ini sudah melaksanakan CLTN per 1 Juli 2024.
- ✓ Bahwa audit internal terkait evaluasi risiko yaitu belum dilakukannya kegiatan monev atau evaluasi penilaian risiko oleh Tim Manajemen Resiko sehingga diadakan rapat ini untuk membahas evaluasi risiko
- ✓ Bahwa telah disepakati 4 jenis kegiatan yaitu sebagai berikut:
 - a. Risiko Pemeriksaan Setempat, sebelumnya bernilai risiko moderat dengan poin 6 namun karena penanganannya masih belum efektif maka hasil evaluasi risikonya masih di level moderat dengan poin 6.
 - b. Risiko Salinan Putusan, sebelumnya bernilai risiko moderat dengan poin 9 namun karena penanganannya masih belum terlalu efektif maka hasil evaluasi risikonya masih di level moderat dengan poin 6.

- c. Risiko Ruang Tamu Terbuka, sebelumnya bernilai resiko tinggi dengan poin 15 namun karena penanganannya sudah efektif maka hasil evaluasi resikonya masih di level moderat dengan poin 3.
- d. Risiko Penilaian Masa Kerja PPNPN, sebelumnya bernilai resiko tinggi dengan poin 12 namun karena penanganannya sudah efektif maka hasil evaluasi resikonya masih di level moderat dengan poin 3.
- ✓ Bahwa terkait inovasi PS, akan dilaksanakan laporan PS yang telah ditandatangani (laporan PS yang biasa dbuat) akan dipdfkan dan diarsipkan secara digital pada aplikasi di One-Tun.
- ✓ Bahwa selanjutnya akan diusulkan pembuatan SK baru untuk Pimpinan Tim Manajemen Resiko pada PTUN Serang.
- ✓ Bahwa hasil rapat ini akan disampaikan kepada Pimpinan baru dari Tim Manajemen Resiko PTUN Serang.

Selanjutnya karena sudah tidak ada yang bertanya dan menanggapi lagi, maka rapat ditutup dengan mengucapkan salam kepada seluruh peserta rapat.

Notulis,



Sufi Aryani

Sekretaris Tim Manajemen Risiko
PTUN Serang,



Dhonni Adhita Saputra



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

**DOKUMENTASI RAPAT
MONEV RISK REGISTER TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
SERANG, 15 AGUSTUS 2024**





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5, Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informask@ptun-serang.go.id

Nomor : 1524 /KPTUN.W2-TUN3/ OT.01.2/XI/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan Rapat Tindak Lanjut Monev
Tim Pembangunan Zona Integritas
pada PTUN Serang

Serang, 20 November 2024

Kepada Yth,
Ketua dan Sekretaris/Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Di-
tempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Ketua dan Sekretaris/Anggota Tim Pembangunan
Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang untuk hadir dalam acara Rapat yang akan
dilaksanakan :

Pada hari, tanggal : Kamis, 28 November 2024
Waktu : 09.00 WIB - selesai
Tempat : Ruang Sidang Online Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
Jalan Syech Nawawi Al-Bantani No.3 Km.5 Serang – Banten.
Agenda : Tindak Lanjut Monev Tim Zona Integritas Tahun 2024

Demikian atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Tim Pembangunan Zona
Integritas Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang,

Rut Endang Lestari



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

DAFTAR HADIR
RAPAT TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
HARI KAMIS, TANGGAL 28 NOVEMBER 2024

NO.	NAMA	JABATAN DINAS	TANDA TANGAN/ PARAF
1	Rut Endang Lestari	UAA	
2	Juhah S	Hakim	
3	Listyorani Imawati	Hakim	
4	Dessy Anggraeni	Hakim	
5	Putri Sukmiani	Hakim	
6	Nurbasmi	sekerban	
7	Luddinias	PP	
8	Sucarnasriyanti	panasid pkr	
9	Tuti	Kasub Umku	
10	ALI Anwar	Hakim	
11	Masni	Kafubag PTIP	
12	Tamsil	Hakim	
13	Berdyan	Hakim	
14	Randy SP	Prakom	
15	Fithi I. Nopita	Setor Pengada Data & Informasi	
16			
17			

Serang, 28 November 2024

Ketua Tim Pembangunan ZI Pengadilan Tata
Usaha Negara Serang.

Rut Endang Lestari



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5. Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: informasi@ptun-serang.go.id

NOTULA

- Dasar : Surat Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 1539/PAN.PTUN.W2-TUN3/RA1.5/XI/2024 tanggal 21 November 2024
- Hari : Jumat
- Tanggal : 28 November 2024
- Pukul : 09.00 WIB - selesai
- Tempat : Ruang Sidang Online Pengadilan Tata Usaha Negara Serang
- Acara : Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Tahun 2024
- Peserta Rapat : Ketua dan Sekretaris Tim masing-masing area Pembangunan Zona Integritas PTUN Serang.

Jalannya Rapat :

Rapat Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dibuka oleh Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan ucapan salam kepada seluruh peserta rapat. Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada masing-masing area untuk memaparkan hasil tindak lanjut monitoring dan evaluasi pelaksanaan Zona Integritas Tahun 2024 dimulai dari Area 1 hingga Area 6.

Atas kesempatan yang diberikan, Area 1 yang diwakili oleh Sdr. Randy Setia Putra, S.Kom. menyampaikan beberapa hal terkait monev pada areanya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa data yang hilang sudah terkumpul di Google Drive.
- ✓ Bahwa SK Budaya Kerja sudah tersedia.
- ✓ Bahwa hal yang perlu ditindaklanjuti yaitu dokumen dari undangan rapat dan notulen pembentukan Tim ZI, laporan monev ZI yang baru tersedia hingga Maret 2024, sehingga masih diperlukan laporan monev ZI untuk Oktober dan November.
- ✓ Bahwa untuk Reform Area I, Pakta Integritas cukup menggunakan dokumen tahun 2024.
- ✓ Bahwa rencana Agen Perubahan tahun 2024 belum tersedia.
- ✓ Bahwa dokumen terkait penerapan program kerja dari Agen Perubahan belum ada.

Selanjutnya Area 2 diwakili oleh Ibu Listyorani Imawati, S.H., M.H. menyampaikan beberapa hal terkait monev pada areanya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa semua kegiatan sudah terlaksana (termasuk Monev PPID dan dokumentasi OneTUN).
- ✓ Bahwa perlu dilakukan Crosscheck yaitu dokumen rencana kerja tahunan atau rencana kerja ZI Tahun 2024.
- ✓ Bahwa laporan Monev SOP sudah tersedia.

Selanjutnya Area 3 diwakili oleh Bapak Tamado Dharmawan, S.H., M.H. menyampaikan beberapa hal terkait monev pada areanya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa terkait Anjab 2019, disusun setiap 5 tahun sekali sehingga tahun 2024 tidak perlu dilakukan dan penyusunan untuk tahun 2025 akan dilakukan pada November.
- ✓ Bahwa pola mutasi terakhir dilaksanakan pada Oktober 2024 dan bagian kepegawaian sudah memiliki data dokumennya.
- ✓ Bahwa untuk SK Reward & Punishment untuk pegawai sudah tersedia, namun perlu ada SK turunan untuk pembentukan tim penilai kinerja dan rencana pembentukan tim akan dilakukan pada Desember 2024.

Selanjutnya Area 4 diwakili oleh Bapak Ali Anwar, S.H., M.H. menyampaikan beberapa hal terkait monev pada areanya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa belum adanya notulensi pemantauan kinerja oleh pimpinan untuk September dan Oktober 2024 berupa notulensi rapat koordinasi bulanan.
- ✓ Bahwa dokumen PKP untuk Oktober 2024 belum tersedia.

Selanjutnya Area 5 diwakili oleh Ibu Juliah Saragih, S.H., M.H. menyampaikan beberapa hal terkait monev pada areanya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa banner belum tersedia dan akan diperbarui dalam bentuk figura atau akrilik.
- ✓ Bahwa Risk Register masih menggunakan Risk Register SMAP dan belum ada untuk Risk Register ZI sehingga diperlukan dokumen MR ZI 2024.
- ✓ Bahwa SK Hawasbid terbaru belum tersedia di google drive.

Selanjutnya Area 6 diwakili oleh Bapak Berdyan Shonatta, S.H. menyampaikan beberapa hal terkait monev pada areanya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa dokumen terkait inovasi perlu diperbarui.
- ✓ Bahwa hasil survei Desember akan diperbarui.
- ✓ Bahwa perlu melakukan pengecekan ulang SK terbaru dan akan berkoordinasi oleh bagian kepegawaian untuk pemenuhan Area VI.
- ✓ Bahwa SOP PTSP sudah dilakukan pembaruan.

Atas laporan yang telah disampaikan oleh masing-masing area, Wakil Ketua PTUN Serang selaku Pimpinan Rapat menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- ✓ Bahwa agar menjadi perhatian penyelesaian kekurangan dokumen evidence ZI berdasarkan rapat hari ini. Dan tidak lupa untuk juga dapat memperhatikan evidence lainnya sesuai dengan list yang menjadi acuan pada PMPZI.

- ✓ Bahwa untuk mengetahui eviden ZI yang lain akan di share user dan password PMPZI pada WA Grup ZI.
- ✓ Bahwa dokumen yang bisa di upload pada link google drive yang akan di share di wa grup wajib berupa PDF yang sudah tersusun rapih dan bersifat optional berupa docx/doc, jika ingin menjadikan drive tersebut sebagai media penyimpanan terpusat , hal ini untuk menghindari kehilangan bahan dokumen.
- ✓ Bahwa target penyelesaian eviden yang belum lengkap yakni pada tanggal 13 Desember 2024.

Selanjutnya dikarenakan tidak ada yang bertanya dan menanggapi lagi, maka rapat ditutup dengan ucapan salam oleh Pimpinan Rapat kepada seluruh peserta rapat.

Notulis,



Fitri Indriati Nofita

Mengetahui,
Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Serang,



Rut Endang Lestari



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

Jalan Syech nawawi Al-Bantani Nomor 3, Km. 5, Telp (0254) 214085 Kota Serang, Banten 42123
www.ptun-serang.go.id, e-mail: Informasi@ptun-serang.go.id

**DOKUMENTASI RAPAT
TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS TAHUN 2024
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG
SERANG, 28 NOVEMBER 2024**

